

**Tabel 7.1**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, 2010-2015**

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MISI I:</b> <b>Menegakkan prinsip-prinsip disiplin demokrasi, supremasi hukum, keadilan dan hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, nyaman, tertib, dan disiplin</b>									
1.1	Terwujudnya sinkronisasi aparat penegak hukum dan jajarannya	Strategi: Pemantapan sinkronisasi aparat penegak hukum dan jajarannya  Arah Kebijakan: Mendorong koordinasi antar aparat penegak hukum dan jajarannya secara rutin untuk terciptanya sinkronisasi dalam penegakkan hukum yang berkeadilan	Jumlah demonstrasi	60 kali	54 kali	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Satpol PP	
			Prosentase laporan mengenai gangguan ketenteraman dan ketertiban yang direspon dalam waktu kurang dari 6 (enam) jam setelah laporan atau informasi diterima	100%	100%	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Wajib- Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP	
			Tingkat disiplin PNS meningkat; prosentase PNS tidak disiplin yang terjaring razia / sidak	2,1%	2,1%	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Satpol PP	
			Rasio jumlah polisi PP/10.000 penduduk	2	2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Satpol PP	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rata-rata kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban per tahun / 1.000 populasi	60	54	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Satpol PP	
			Rata-rata kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban per tahun / 1.000 populasi	60	54	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan keamanan	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Satpol PP	
			Jumlah demonstrasi	60	54	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan keamanan	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Satpol PP	
			Jumlah laporan kasus pelanggaran penyakit masyarakat ke Satpol PP	12	12	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Satpol PP	Badan Kesbangpol
			Prosentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani	100%	100%	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Satpol PP	Badan Kesbangpol
			Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	40 LSM/ Ormas/ OKP	50 LSM/ Ormas/ OKP	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Terselenggara nya pengkajian, pengendalian, dan evaluasi produk hukum daerah serta penyebaran peraturan perundang-undangan daerah	Strategi: Penyesuaian produk hukum daerah dengan yang baru/lebih tinggi dan keserasian dengan perundang-undangan daerah  Arah Kebijakan: Melakukan pengkajian, pengendalian, dan evaluasi produk hukum daerah serta penyebaran peraturan perundang-undangan daerah	-	-	-	Program Peningkatan Kepastian Hukum Dalam Penerapan Semua Peraturan Perundang-undangan	Wajib- otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Setda Biro Hukum dan HAM	
1.3	Terlaksananya Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA)	Strategi: Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA)  Arah Kebijakan: Melakukan revitalisasi HANKAMRATA untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pihak keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri	Angka Kriminalitas	13.000 Kasus	12.000 Kasus	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	
			Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	40 LSM/ Ormas/ OKP	50 LSM/ Ormas/ OKP	Program Peningkatan Keamanan Dan kenyamanan Lingkungan	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	Satpol PP
			Jumlah Masalah/ kejadian terkait ketahanan bangsa yang ditindaklanjuti	2	1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	
			Jumlah Masalah/ kejadian terkait ketahanan bangsa yang ditindaklanjuti	2	1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	
			Jumlah laporan kasus pelanggaran penyakit masyarakat ke Kesbangpol	12		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prosentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani	100%		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	
			Indeks Domokrasi Indonesia (IDI) Sulut	68 (dari skala 0 sampai 100)	73 (dari skala 0 sampai 100)	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	
1.4	Terwujudnya kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	Strategi: Pemantapan kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat  Arah kebijakan: Mendorong pengembangan kearifan lokal serta budaya taat hukum di kalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih kondusif	Jumlah laporan kasus pelanggaran penyakit masyarakat ke Kesbangpol	12		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	
			Prosentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani	100%		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Wajib- Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	
1.5	Terwujudnya rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya)	Strategi: Peningkatan rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya).  Arah Kebijakan: Mendorong silaturahmi dan kerjasama antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama, etnik, maupun golongan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan hubungan yang	Jumlah Masalah/ kejadian terkait ketahanan bangsa yang ditindaklanjuti	2	1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Wajib - Kesbang & Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	
			Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan, perlindungan dan jaminan sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan	11%	22 %	Program Jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		harmonis antar kelompok-kelompok masyarakat	peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial						
			Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial	-	19%	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	
			Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	4%	22%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya fungsi sosial PMKS Anak Terlantar melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan pelatihan ketrampilan; Persentase Anak Terlantar yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan pelatihan ketrampilan	16.67%	16.67%	Program Pembinaan Anak Terlantar	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	
			Meningkatnya fungsi sosial PMKS penyandang cacat dan trauma melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penyandang cacat dan trauma yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	-	20%	Program Pembinaan Para penyandang cacat dan Trauma	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	
			Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan,	100%	100%	Program pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial						
			Meningkatnya fungsi sosial PMKS Eks penyandang penyakit sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	-	25%	Program Pembinaan Eks penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	
			Meningkatnya fungsi PSKS dalam penyelenggaraan kesos melalui pelayanan dan pemberdayaan; Persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan	13%	13%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan sosial						
1.6	Terlaksananya peran dan fungsi pendidikan lembaga keagamaan dalam kerukunan umat beragama	Strategi: Pemantapan peran kelembagaan keagamaan.  Arah Kebijakan: Mengembangkan upaya untuk meningkatkan peran kelembagaan agama sebagai institusi yang mendorong pengembangan iman dan keselarasan hidup inter dan antar umat beragama				Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/ Lembaga Keagamaan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Biro Kesra	
						Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Biro Kesra	
1.7	Terlaksananya fungsi pranata sosial masyarakat (keluarga, kependuan, paguyuban) dan peran kelompok profesional	Strategi: Pemantapan fungsi pranata sosial (keluarga, kependuan, paguyuban) dan peran kelompok profesional Arah Kebijakan: Mendorong dan memfasilitasi pengembangan fungsi pranata sosial untuk menghasilkan generasi yang	Jumlah Masalah/ kejadian terkait ketahanan bangsa yang ditindaklanjuti	2	1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Wajib- Kesbangpol	Badan Kesbangpol	
			Terlaksananya pemberdayaan organisasi sosial	0 organisasi	15 organisasi (kumulatif 5 tahun)	Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial	Wajib- Kesbangpol	Badan Kesbangpol	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		mencintai ketertiban, taat hukum, dan saling menghargai	Jumlah TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang di berdayakan)	0 orang	130 orang (kumulatif 5 tahun)	Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial	Wajib-Kesbangpol	Badan Kesbangpol	
1.8	Meningkatkan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan	Strategi: Pemantapan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan  Arah Kebijakan: Memperkuat kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan	Jumlah peraturan/ sosialisasi kebijakan kualitas hidup anak dan perempuan	1 Dokumen Perda	Rancangan Peraturan Daerah Kesetaraan dan Keadilan Gender	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Wajib-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan PP dan PA	
			Meningkatnya Jumlah Lembaga Peduli Perempuan dan Anak	2 Organisasi	2 Organisasi	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan PP dan PA	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	30%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan PP dan PA	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	30%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan PP dan PA	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,05%	68,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PA	Badan PP dan PA	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,00%	68,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PA	Badan PP dan PA	
			Ratio Kekerasan dalam rumah tangga	0,40%	0,20%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PA	Badan PP dan PA	
			Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	31,84%	39,00%	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PA	Badan PP dan PA	
			Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	5	1400,00%	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PA	Badan PP dan PA	
			Porprosi Kursi parlemen yang diduduki perempuan	25,00%	25,00%	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PA	Badan PP dan PA	
			Jumlah kader parpol perempuan yg mendapatkan pendidikan politik	50	200	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PA	Badan PP dan PA	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		75,00%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PA	Badan PP dan PA	
1.9	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat	Strategi: Peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui upaya pendidikan politik dan forum-forum diskusi politik yang efektif  Arah Kebijakan: Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik dan forum-forum diskusi politik	Indeks Domokrasi Indonesia (IDI) Sulut	68 (dari skala 0 sampai 100)	73 (dari skala 0 sampai 100)	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Wajib - Kesbang & Politik Dalam Negeri	Kesbangpol	
<b>MISI II:</b> <b>Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia.</b>									
2.1	Terwujudnya sanggar-sanggar budaya serta komunitas adat dan bahasa daerah	Strategi: Pengembangan dan pemberdayaan sanggar-sanggar budaya serta komunitas adat dan bahasa daerah  Arah Kebijakan: Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sanggar-sanggar budaya serta	Cakupan informasi potensi kebudayaan dan pariwisata melalui pameran promosi di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kegiatan MICE	0%	100%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Wajib- Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata	Disparbud	
			Proporsi objek wisata kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan serta	0%	100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Wajib- Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata	Disparbud	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal serta menjadi sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan						
			Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam menerapkan sadar wisata	0%	100%	Program Pengembangan Kemitraan	Wajib-Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata	Disparbud	
			Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kekayaan budaya daerah	0%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Wajib-Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata	Disparbud	
			Pelestarian Budaya sebagai daya tarik wisata dengan melibatkan generasi muda serta tokoh masyarakat	0%	100%	Program Pengembangan Nilai Budaya	Wajib-Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata	Disparbud	
			Jumlah seniman, dan potensi seni, serta jumlah kreasi yang dapat dipentaskan	0%	100%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Wajib-Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata	Disparbud	
2.2	Terwujudnya status kawasan konservasi menjadi kawasan konservasi dunia (World)	Strategi: Peningkatan status kawasan konservasi menjadi kawasan konservasi dunia ( <i>World Heritage Sites</i> , Cagar Biosfer)  Arah Kebijakan: Mendorong perbaikan dan	Terbentuknya kelembagaan KPHP/L	-	-	Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Heritage Sites, Cagar Biosfer)	pembenahan kawasan konservasi untuk menjaga kelestariannya serta melakukan berbagai upaya yang diperlukan agar kawasan-kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi dunia	Terehabilitasinya hutan dan lahan kritis	-	-	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
			Terkendalinya gangguan keamanan hutan dan pelaku tindak pidana kehutanan	-	75%	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
			Tersedianya data dan informasi pelaku industri hasil hutan dan pemasaran	-	3 Keg	Program Pembinaan Dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
			Terbangunnya Taman Hutan Raya sebagai taman kebanggaan Provinsi Sulawesi Utara	-	1 Unit/Keg	Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
			Terpeliharanya batas kawasan hutan	-	210 Km	Program Pemantapan Kawasan Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Menurunnya Volume Sampah Yang di Angkut TPA	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4000 Kg sampah kemasan air mineral terangkut dari pulau bunaken</li> <li>- Pendampingan 1 kelompok pengolah sampah kemasan air mineral</li> <li>- Bimtek/sosialisasi persampahan 8 kelompok masyarakat</li> </ul>	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
			Terminimalisasi Pencemaran Lingkungan yang merusak kualitas air dan udara	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Kab/kota mendapat penghargaan adipura</li> <li>- 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya</li> <li>- 6 kota terpantau kualitas udara Ambient</li> <li>- Penanganan kasus link 6 kasus</li> </ul>	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
			Memastikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan link sudah terintegrasi kedalam	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 dok RPPLH</li> <li>- 1 dok KLHS</li> <li>- Draft Ekoregion 1 dok</li> <li>- Bimtek</li> </ul>	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib -	Badan Lingkungan Hidup	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kebijakan, rencana, dan/atau program daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>pelaporan UKL/UPL 3 keg</li> <li>-Evaluasi implementasi KLHS 15 kab/kota</li> <li>- Binwas UKL/UPL 15 kab/kota</li> <li>- Sosialisasi naskah akademik RPPLH 2 keg</li> <li>- Diseminasi amdal 2 keg</li> </ul>		Lingkungan Hidup		
			Menurunnya laju kerusakan lingkungan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman pohon pada sumber mata air 100 titik</li> <li>- Penanaman Mangrove 10.000 pohon</li> <li>- Taman KEHATI 1 lokasi</li> <li>- Forum DAS Tondano 3 keg</li> <li>- Pengguna BPO sektor MAC 200 mobil</li> <li>- Penerima penghargaan kalpataru 15 Orang</li> <li>- 34 Sekolah Adiwiyata</li> <li>- Profil Kehati SULUT 1 dok</li> </ul>	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya luasan tutupan karang hidup	-	Restorasi Terumbu Karang 2 Lokasi	Program rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	-	- SLHD 5 dok - Rakor PLH 5 keg - Pekan link 5 keg - pameran dan promosi 5 keg	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
			NTP Nelayan	97	108	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah POKMASWAS	77 Klmk	200 Klmk	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kerjasama pengendalian IIU Fishing	1 kegiatan	1 kegiatan	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah kegiatan mitigasi dan prakiraan iklim	1 lokasi	4 lokasi	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah produksi budidaya	98.503	697.694	Program pengembangan budidaya perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah produksi tangkap	222.221	244.542	Program pengembangan perikanan tangkap	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kegiatan pembinaan ke masyarakat	3 kegiatan	10 kegiatan	Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah ekspor perikanan (nilai ekspor)	96.094.118	155.000	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah pulau yang teridentifikasi potensinya	1	15	Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah koordinasi dengan kab/kota	2 kegiatan	10 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	5.000	Program pengembangan peningkatan mutu laboratium perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	5.000	Program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah koordinasi perencanaan	3 kegiatan	3 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Terwujudnya Pelestarian kawasan konservasi (Taman Nasional: Bunaken, dan Bogani Nani Wartabone; Cagar Alam: Tangkoko, Dua Sudara; Suaka Margasatwa: Manembo-nembo, Karakelang; Taman Wisata Alam: Batu Putih, Batu Angus).	Strategi: Pelestarian kawasan konservasi (Taman Nasional: Bunaken, dan Bogani Nani Wartabone; Cagar Alam: Tangkoko, Dua Sudara; Suaka Margasatwa: Manembo-nembo, Karakelang; Taman Wisata Alam: Batu Putih, Batu Angus).  Arah Kebijakan: Melakukan upaya untuk menetapkan kawasan konservasi baru untuk memperluas cakupan upaya pelestarian alam	Terbentuknya kelembagaan KPHP/L	-	-	Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
			Terehabilitasinya hutan dan lahan kritis	-	-	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
			Terkendalinya gangguan keamanan hutan dan pelaku tindak pidana kehutanan	-	75%	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
			Tersedianya data dan informasi pelaku industri hasil hutan dan pemasaran	-	3 Keg	Program Pembinaan Dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
			Terbangunnya Taman Hutan Raya sebagai taman kebanggaan Provinsi Sulawesi Utara	-	1 Unit/Keg	Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terpeliharanya batas kawasan hutan	-	210 Km	Program Pemantapan Kawasan Hutan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
			Menurunnya Volume Sampah Yang di Angkut TPA	-	- 4000 Kg sampah kemasan air mineral terangkut dari pulau bunaken  - Pendampingan 1 kelompok pengolah sampah kemasan air mineral  - Bimtek/sosialisasi persampahan 8 kelompok masyarakat	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
			Terminimalisasi Pencemaran Lingkungan yang merusak kualitas air dan udara	-	- 6 Kab/kota mendapat penghargaan adipura  - 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- 6 kota terpantau kualitas udara Ambient  - Penanganan kasus link 6 kasus				
			Memastikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan link sudah terintegrasi kedalam kebijakan, rencana, dan/atau program daerah	-	- 1 dok RPPLH - 1 dok KLHS - Draft Ekoregion 1 dok - Bimtek pelaporan UKL/UPL 3 keg - Evaluasi implementasi KLHS 15 kab/kota - Binwas UKL/UPL 15 kab/kota - Sosialisasi naskah akademik RPPLH 2 keg - Diseminasi amdal 2 keg	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
			Menurunnya laju kerusakan lingkungan	-	- Penanaman pohon pada sumber mata air 100 titik - Penanaman Mangrove 10.000 pohon - Taman KEHATI 1 lokasi - Forum DAS	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tondano 3 keg - Pengguna BPO sektor MAC 200 mobil - Penerima penghargaan kalpataru 15 Orang - 34 Sekolah Adiwiyata - Profil Kehati SULUT 1 dok				
			Meningkatnya luasan tutupan karang hidup	-	Restorasi Terumbu Karang 2 Lokasi	Program rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	-	- SLHD 5 dok - Rakor PLH 5 keg - Pekan link 5 keg - pameran dan promosi 5 keg	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
			NTP Nelayan	97	108	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah POKMASWAS	77 Klmk	200 Klmk	Program pemberdayaan masyarakat dalam	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup		
			Jumlah kerjasama pengendalian IUU Fishing	1 kegiatan	1 kegiatan	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kegiatan mitigasi dan prakiraan iklim	1 lokasi	4 lokasi	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah produksi budidaya	98.503	697.694	Program pengembangan budidaya perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah produksi tangkap	222.221	244.542	Program pengembangan perikanan tangkap	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kegiatan pembinaan ke masyarakat	3 kegiatan	10 kegiatan	Program pengembangan sistim penyuluhan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						perikanan	Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup		
			Jumlah ekspor perikanan (nilai ekspor)	96.094.118	155.000	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah pulau yang teridentifikasi potensinya	1	15	Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah koordinasi dengan kab/kota	2 kegiatan	10 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	5.000	Program pengembangan peningkatan mutu laboratorium perikanan	Pilihan - Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Wajib - Lingkungan Hidup	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2.4	Terwujudnya Daerah Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	Strategi: Pemantapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	5.000	Program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	Arah Kebijakan: Mendorong dan melakukan berbagai tindakan untuk membenahi daerah perlindungan laut dan perlindungan Mangrove untuk mencegah bencana yang berasal dari laut dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup yang kondusif	Jumlah POKMASWAS	77 Klmk	200 Klmk	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kerjasama pengendalian IUU Fishing	1 kegiatan	1 kegiatan	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kegiatan mitigasi dan prakiraan iklim	1 lokasi	4 lokasi	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah produksi budidaya	98.503	697.694	Program pengembangan budidaya perikanan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah produksi tangkap	222.221	244.542	Program pengembangan perikanan tangkap	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kegiatan pembinaan ke masyarakat	3 kegiatan	10 kegiatan	Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah ekspor perikanan (nilai ekspor)	96.094.118	155.000	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah pulau yang teridentifikasi potensinya	1	15	Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah koordinasi dengan kab/kota	2 kegiatan	10 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	5.000	Program pengembangan peningkatan mutu laboratorium perikanan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	5.000	Program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah koordinasi perencanaan	3 kegiatan	3 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Pilihan -Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Cakupan sistem informasi kebencanaan	-	-	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)	
			Cakupan pemulihan daerah bencana	-	3 daerah rawan bencana	Program Pemulihan Daerah Bencana	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)	
			Cakupan penyebaran informasi di daerah rawan bencana	-	-	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)	
			Cakupan Daerah Resiko Bencana Tinggi	-	3 daerah	Program Pengurangan Resiko Bencana	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)	
			Cakupan Kelompok Masyarakat Siaga Bencana	-	3 pokmas	Program Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)	
			Prosentase kabupaten diberikan bantuan bagi korban bencana	-	20%	Program Penanganan Darurat	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(BPBD)	Penanggulan n Bencana Daerah (BPBD)	
			Cakupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Tersedia	-	7 sarpras	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulan n Bencana Daerah (BPBD)	
			Tersusunnya perencanaan penanggulangan bencana terpadu	-	5	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulan n Bencana Daerah (BPBD)	
			Jumlah bimtek/pelatihan kapasitas penanggulangan bencana terpadu	-	5 kegiatan	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulan n Bencana Daerah (BPBD)	
			Cakupan daerah rawan bencana	-	5 daerah	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulan n Bencana Daerah (BPBD)	
			Cakupan daerah pengembangan budaya sadar bencana	-	5 daerah	Program Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulan n Bencana Daerah (BPBD)	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terlaksananya pengendalian dan operasional penanggulangan bencana	-	5 kegiatan	Program Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana	Wajib – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	
2.5	Terwujudnya kawasan konservasi baru termasuk pengembangan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA)	Strategi: Penetapan kawasan konservasi baru termasuk pengembangan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA). Arah Kebijakan: Penetapan kawasan konservasi baru termasuk pengembangan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA)	Terbentuknya kelembagaan KPHP/L	-	-	Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			Terehabilitasinya hutan dan lahan kritis	-	-	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			Terkendalinya gangguan keamanan hutan dan pelaku tindak pidana kehutanan	-	75%	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			Tersedianya data dan informasi pelaku industri hasil hutan dan pemasaran	-	3 Keg	Program Pembinaan Dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			Terbangunnya Taman Hutan Raya sebagai taman kebanggaan Provinsi Sulawesi Utara	-	1 Unit/Keg	Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			Terpeliharanya batas kawasan hutan	-	210 Km	Program Pemantapan Kawasan Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			NTP Nelayan	97	108	Program pemberdayaan ekonomi	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						masyarakat pesisir			
			Jumlah POKMASWAS	77 Klmk	200 Klmk	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kerjasama pengendalian IUU Fishing	1 kegiatan	1 kegiatan	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kegiatan mitigasi dan prakiraan iklim	1 lokasi	4 lokasi	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah produksi budidaya	98.503	697.694	Program pengembangan budidaya perikanan	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah produksi tangkap	222.221	244.542	Program pengembangan perikanan tangkap	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kegiatan pembinaan ke masyarakat	3 kegiatan	10 kegiatan	Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah ekspor perikanan (nilai ekspor)	96.094.118	155.000	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah pulau yang teridentifikasi potensinya	1	15	Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah koordinasi dengan kab/kota	2 kegiatan	10 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	5.000	Program pengembangan peningkatan mutu laboratorium perikanan	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	5.000	Program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah koordinasi perencanaan	3 kegiatan	3 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Pilihan- kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Terwujudnya pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (cagar budaya)	Strategi: Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (cagar budaya)  Arah kebijakan : Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (cagar budaya)	Cakupan informasi potensi kebudayaan dan pariwisata melalui pameran promosi di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kegiatan MICE	0%	100%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Wajib Budpar	Dinas Budpar	
			Proporsi objek wisata kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan serta keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan	0%	100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Wajib Budpar	Dinas Budpar	
			Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam menerapkan sadar wisata	0%	100%	Program Pengembangan Kemitraan	Wajib Budpar	Dinas Budpar	
			Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kekayaan budaya daerah	0%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Wajib Budpar	Dinas Budpar	
			Pelestarian Budaya sebagai daya tarik wisata dengan melibatkan generasi muda serta tokoh masyarakat	0%	100%	Program Pengembangan Nilai Budaya	Wajib Budpar	Dinas Budpar	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah seniman, dan potensi seni, serta jumlah kreasi yang dapat dipentaskan	0%	100%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Wajib Budpar	Dinas Budpar	
2.7	Terlaksananya Pengembangan penulisan buku dan pemberian penghargaan bagi penulis daerah	Strategi: Pengembangan penulisan buku dan pemberian penghargaan bagi penulis daerah  Arah Kebijakan: Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan termasuk di dalamnya penulisan buku mengenai lingkungan dan budaya serta penghargaan bagi para penulisnya	Tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan	-	6000 arsip	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Wajib - perpustakaan	Badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi	
			Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	-	5000 books	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Wajib - perpustakaan	Badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi	
			Terpeliharanya arsip daerah	-	5000 books	Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	Wajib - perpustakaan	Badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi	
			Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip daerah	-	15 paket	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Wajib - perpustakaan	Badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi	
			-	-	-	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Wajib - perpustakaan	Badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi	
2.8	Terlaksananya program pembangunan yang berwawasan lingkungan	Strategi: Pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Menurunnya Volume Sampah Yang di Angkut TPA	-	- 4000 Kg sampah kemasan air mineral terangkut dari pulau bunaken	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Wajib - Lingkungan Hidup	BLH	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan berkelanjutan	Arah Kebijakan: Memprioritaskan pembangunan yang memiliki dampak negatif yang paling minimal bagi lingkungan serta mengembangkan berbagai upaya untuk menghindarkan kalangan dunia usaha untuk melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup			- Pendampingan 1 kelompok pengolah sampah kemasan air mineral  - Bimtek/sosialisasi persampahan 8 kelompok masyarakat				
			Terminimalisasi Pencemaran Lingkungan yang merusak kualitas air dan udara	-	- 6 Kab/kota mendapat penghargaan adipura  - 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya  - 6 kota terpantau kualitas udara Ambient  - Penanganan kasus link 6 kasus	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Wajib : Lingkungan Hidup	BLH	
			Memastikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan link sudah terintegrasi kedalam kebijakan, rencana, dan/atau program daerah	-	- 1 dok RPPLH - 1 dok KLHS - Draft Ekoregion 1 dok - Bimtek pelaporan UKL/UPL 3 keg - Evaluasi implementasi KLHS 15 kab/kota	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Wajib : Lingkungan Hidup	BLH	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Binwas UKL/UPL 15 kab/kota</li> <li>- Sosialisasi naskah akademik RPPLH 2 keg</li> <li>- Diseminasi amdal 2 keg</li> </ul>				
			Menurunnya laju kerusakan lingkungan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman pohon pada sumber mata air 100 titik</li> <li>- Penanaman Mangrove 10.000 pohon</li> <li>- Taman KEHATI 1 lokasi</li> <li>- Forum DAS Tondano 3 keg</li> <li>- Pengguna BPO sektor MAC 200 mobil</li> <li>- Penerima penghargaan kalpataru 15 Orang</li> <li>- 34 Sekolah Adiwiyata</li> <li>- Profil Kehati SULUT 1 dok</li> </ul>	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Wajib : Lingkungan Hidup	BLH	
			Meningkatnya luasan tutupan karang hidup	-	Restorasi Terumbu Karang 2 Lokasi	Program rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Wajib : Lingkungan Hidup	BLH	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya Penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	-	- SLHD 5 dok - Rakor PLH 5 keg - Pekan link 5 keg - pameran dan promosi 5 keg	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Wajib : Lingkungan Hidup	BLH	
<b>MISI III:</b> <b>Memantapkan penerapan <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i> yang bebas korupsi,kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal.</b>									
3.1	Terlaksananya reformasi birokrasi	Strategi: Pemantapan reformasi birokrasi  Arak Kebijakan: Mengembangkan struktur birokrasi yang miskin struktur namun kaya fungsi serta pengisian sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya	Cakupan kab/kota yg melaksanakan manajemen kepegawaian/ pola karir sesuai aturan	100% (15 Kab/kota	100% (15 Kab/kota	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD	
			Prosentase CPNS yang diangkat untuk memenuhi kebutuhan formasi (jumlah CPNS yang diangkat dibagi kebutuhan formasi sesuai dengan analisis kebutuhan)	90%	100%	Program pengadaan dan pengembangan pegawai	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD	
			Prosentase peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur (jumlah PNS terkirim dalam Diklat dibanding	65%	90%	Program pengadaan dan pengembangan pegawai	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	BKD	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			jumlah PNS)				daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian		
			Prosentase PNS yg difasilitasi naik pangkat, pindah dan pensiun (keputusan jadi dibandingkan jumlah usulan kenaikan pangkat, pindah dan pensiun)	90%	95%	Program pengelolaan kenaikan pangkat, pembinaan dan pensiun	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD	
			Prosentase Akurasi data dan informasi sebagai dukungan bahan pengambil kebijakan kepegawaian	80%	98%	Program pengembangan data dan informasi kepegawaian	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD	
			Cakupan PNS yg mendapatkan pengaharagaan satyalancana karyasatya	80%	100%	Program pengelolaan kesejahteraan pegawai	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			cakupan PNS yg difasilitasi dalam hal BPJS, Bapertarum, Taspen	90%		Program pengelolaan kesejahteraan pegawai	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD	
			Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS	62 Kasus Pelanggaran disiplin PNS, 13 Pelanggaran Etika PNS	turun 20% dari tahun sebelumnya	Program pembinaan dan pengawasan aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD	
			Prosentase aparatur daerah yang dinilai berdasarkan penilaian kinerja instansi dan pegawai	100%	100%	Program pembinaan dan pengawasan aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD	
3.2	Terselenggara nya pengawasan pengelolaan keuangan	Strategi: Peningkatan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	-	-	-	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	Inspektorat	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pemerintah daerah yang baik	Arah Kebijakan: Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah				Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian		
			-	-	-	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Inspektorat	
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah	Strategi: Peningkatan peran monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah  Arah Kebijakan: Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	-	-	-	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Inspektorat	
			-	-	-	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	Inspektorat	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian		
3.4	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Strategi: Peningkatan fasilitasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)  Arah Kebijakan: Intensifikasi dan fasilitasi pelaksanaan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-	-	-	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Inspektorat	
			-	-	-	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			
3.5	Terlaksananya keberlanjutan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten/ kota	Strategi: Pencapaian dan pemantapan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.  Arah Kebijakan: Mendorong perbaikan	Prosentase pengelolaan/penatausahaan keuangan, administrasi dan dokumen aset sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	90%	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		berkelanjutan atas sistem administrasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehingga pemerintah provinsi dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat mencapai predikat tersebut	Prosentasi pelayanan terhadap masyarakat/wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan SAMSAT online	80%	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentase PNS Dinas Pendapatan Daerah yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Pendapatan Daerah	90%	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak sesuai target yg ditetapkan	100%	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak	100%	-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah **	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	Dinas Pendapatan Daerah	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian		
			Prosentase target penerimaan pendapatan daerah yang harus direalisasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	100%	100%	Program penelitian dan pengembangan pendapatan daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak	100%	100%	Program intensifikasi pengelolaan pajak daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
				100%	-	Program ekstensifikasi sumber retribusi daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prosentase unit pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan tertib administrasi pengelolaan penerimaan, penatausahaan anggaran belanja, aset/barang inventaris dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	Program pengawasan pengelolaan pendapatan daerah, aset dan personil	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentase dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang diterima Provinsi Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota	100%	100%	Program optimalisasi pengelolaan dana perimbangan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
3.6	Terwujudnya pelayanan perijinan terpadu di seluruh kabupaten/kota	Strategi: Pemantapan pelayanan perijinan terpadu di seluruh kabupaten/kota  Arah kebijakan: Mendorong kegiatan investasi di daerah melalui pelayanan perijinan terpadu	Berkembangnya kemitraan, kerjasama investasi dan promosi daerah (tingkat partisipasi dan promosi pameran)	1 kali dalam setahun	-	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya Jumlah Ijin dan non ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	507 Ijin	-	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	
			Prosentase pengelolaan ijin dan non ijin sesuai dengan SOP Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	100% (Ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang ada di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu)	-	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	
			Meningkatnya Jumlah Ijin dan non ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	-	644 Ijin	Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prosentase pengelolaan ijin dan non ijin sesuai dengan SOP Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	-	100% (Ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang ada di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu)	Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	
3.7	Terwujudnya inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk upaya pengembangan program non budgeter	Strategi: Peningkatan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk upaya pengembangan program non budgeter.  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan aparat pemerintah untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan kreativitas sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat				Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Biro Pembangunan	
						Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Setda (biro organisasi)	
			Jumlah Kab/Kota yang memperoleh penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara	0	9 Kab / Kota	Peningkatan ketatalaksanaan, sistem dan prosedur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Setda (biro organisasi)	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah kunjungan wisatawan ke TMII anjungan Sulawesi Utara (Orang)	-	-	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Jumlah Kerjasama antar pemerintah daerah	-	-	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Penghubung	Tidak ada pengaduan masyarakat	-	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan publik Badan penghubung pemprov Sulut di Jakarta)	-	-	Program peningkatan/ fasilitas bidang promosi dan informasi, pendekatan investasi dan keprotokoleran	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Jumlah kunjungan wisatawan ke TMII anjungan Sulawesi Utara (orang)	-	18.000	Program pengelolaan dan pemeliharaan TMII dan asrama mahasiswa	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah kunjungan wisatawan ke TMII anjungan Sulawesi Utara	-	18.000	Program peningkatan/ fasilitasi bidang promosi dan informasi budaya daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan publik Badan penghubung pemprov Sulut di Jakarta)	-	-	Program pelayanan umum keprotokoleran	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
3.8	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi yang transparan dan akuntabel	Strategi: Meningkatkan kempuan aparat pengelola keuangan dan pelayanan keuangan serta penyediaan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, melaksanakan pengendalian anggaran belanja	Tersedianya Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD Pemeritah Daerah	-	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Arah Kebijakan: Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	-	-		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			Peningkatan opini badan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah	-		Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			-	-		Program penataan peraturan perundang-undangan	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-	-		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			Tersedianya Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	1 (satu) Perda APBD dan 1 (satu) Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	1 (satu) Perda APBD dan 1 (satu) Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	Program penganggaran daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			Tersedianya regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	Tersedianya regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	Tersedianya 8 (delapan) regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	Program penataan regulasi keuangan dan barang milik daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Kompeten. (Jumlah bimbingan teknis dalam rangka pengelolaan daerah)	-	5 Bimbingan teknis	Program peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan barang milik daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			-	-		Program pengelolaan belanja transfer	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara	-	1 (Satu) Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Program pengelolaan barang milik daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan opini badan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah	-	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP	Program pengelolaan perbendaharaan daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			Peningkatan opini badan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah	-	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP	Program pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yg tepat waktu.	-	1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yg tepat waktu	Program peningkatan akuntabilitas Pelaporan keuangan daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan opini badan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah	-	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP	Program peningkatan akuntabilitas Pelaporan keuangan daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			Tersajinya informasi keuangan dan barang milik daerah yang akurat	-	1 simda keuangan	Program peningkatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah SKPD	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
			Tersajinya informasi UAPPA/B-W yang akurat	-	1 simda barang	Program peningkatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah SKPD	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Cakupan pelaksanaan Perda tentang Investasi, Hutang dan Piutang Daerah secara akurat	-	90%	Program peningkatan pengelolaan investasi, hutang dan piutang daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)	
3.9	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama APBD	Strategi: Meningkatkan koordinasi pengelolaan sumber penerimaan daerah, peningkatan pelayanan penatausahaan administrasi dan peningkatan sistem dan sumberdaya manusia  Arah Kebijakan: Mendorong peningkatan kinerja aparatur di bidang pelayanan administrasi dan peningkatan penerimaan daerah yang ditunjang dengan sistem dan sarana prasarana memadai	Prosentase pengelolaan/penatausahaan keuangan, administrasi dan dokumen aset sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	90%	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentasi pelayanan terhadap masyarakat/wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan SAMSAT online	80%	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prosentase PNS Dinas Pendapatan Daerah yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Pendapatan Daerah	90%	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak sesuai target yg ditetapkan	100%	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak	100%	-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah **	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prosentase target penerimaan pendapatan daerah yang harus direalisasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	100%	100%	Program penelitian dan pengembangan pendapatan daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak	100%	100%	Program intensifikasi pengelolaan pajak daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
				100%	-	Program ekstensifikasi sumber retribusi daerah	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prosentase unit pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan tertib administrasi pengelolaan penerimaan, penatausahaan anggaran belanja, aset/barang inventaris dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	Program pengawasan pengelolaan pendapatan daerah, aset dan personil	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
			Prosentase dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang diterima Provinsi Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota	100%	100%	Program optimalisasi pengelolaan dana perimbangan	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas Pendapatan Daerah	
3.10	Terfasilitasi-nya Dewan dalam penyusunan Produk DPRD	Strategi: Pemantapan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  Arah Kebijakan: Mengembangkan penataan dan perbaikan kinerja DPRD Prov. Sulut menjadi lebih maksimal sehingga menghasilkan produk-produk DPRD yang berkualitas dan	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	11	14	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Wajib – Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Dewan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		memperhatikan kepentingan masyarakat	Terciptanya Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD	-	3	Program Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD	Wajib – Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Dewan	
3.11	Meningkatnya Hasil penilaian kriteria kelayakan penyelenggara an Diklat sesuai standar LAN RI pada unsur tenaga kediklatan, program diklat dan fasilitas diklat	Strategi: Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan, Pengembangan program kegiatan diklat, peningkatan fasilitas diklat  Arah Kebijakan: Mendorong dan Memfasilitasi SDM tenaga Kediklatan untuk mengikuti MOT (Management of Training) TOC (Training of Course), TOT (Training of Trainers), dan diklat penjenjangan lainnya, mengembangkan kualitas maupun kuantitas kegiatan diklat serta meningkatkan fasilitas diklat	Cakupan aparatur yang memiliki kompetensi struktural, teknis dan fungsional	65	75	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Wajib: Kualitas SDM Aparatur Daerah	Diklat	
			Jumlah program / rumpun diklat yang terlaksana dalam rangka pengembangan pola karir aparatur	6	10	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Wajib: Kualitas SDM Aparatur Daerah	Diklat	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12	Terwujudnya aparatur sebagai anggota Korpri yang bebas KKN dan disiplin	Strategi: Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang ada dalam pembentukan responsibilitas serta sinergitas pemerintahan  Arah kebijakan: Peningkatan kapasitas aparatur lewat sosialisasi dan kegiatan analisis beban kerja sesuai tupoksi	Terselenggaranya Program Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	-	-	Program Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
			Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
			Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
			Terlaksananya Program pembinaan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	-	-	Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	Sekretariat Korpri	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						KORPRI	keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian		
				-	-	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
3.13	Terbinanya PNS dan meningkatkan kekuatan lembaga Korpri sebagai wadah aparatur birokrasi di daerah Provinsi Sulawesi Utara	Strategi: Mendorong peningkatan kekuatan lembaga KORPRI sebagai organisasi yang menaungi anggotanya  Arah Kebijakan: Pembentukan lembaga konsultasi bantuan dalam pendampingan bagi anggota-anggota Korpri yang bermasalah dengan hukum	Terlaksananya Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	Program Pengembangan Nilai Budaya	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
			Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
			Terlaksananya Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan	-	-	Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
			Terlaksananya Program pembinaan Fasilitasi dan	-	-	Program Pembinaan, Fasilitasi dan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan	Sekretariat Korpri	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penguatan Kelembagaan KORPRI			Penguatan Kelembagaan KORPRI	umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian		
				-	-	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
3.14	Terciptanya aparatur birokrasi yang berdaya saing dan sejahtera	Strategi: Mendorong peningkatan penyediaan kesejahteraan anggota Korpri menuju kearah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi  Arah Kebijakan: Penguatan program-program peningkatan kesejahteraan dalam hal penyediaan saran pemukiman yang baik.	Terlaksananya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	-	-	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
			Terselenggaranya Program Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	-	-	Program Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	Sekretariat Korpri	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian		
			Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
			Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terlaksananya Program pembinaan Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	-	-	Program Pembinaan, Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
				-	-	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Sekretariat Korpri	
3.15	Terselenggara nya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Strategi: Penerapan Pemerintah yang transparan dan akuntabel  Arah Kebijakan: Mendorong perbaikan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah, pertanggung jawaban dan kinerja pemerintah daerah	Tersusunnya dokumen : - LPPD - ILPD - LKPJ	0	15 dok	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Setda (biro Pemerintahan dan Humas)	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tersusunnya dokumen LAKIP	0	5	Peningkatan dan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Setda (Biro Organisasi)	
3.16	Terwujudnya program dan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota	Strategi: Sinergitas pelaksanaan program dan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota  Arah Kebijakan : Mendorong koordinasi lintas satuan kerja di tingkat provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meminimalkan tumpang tindih program sehingga belanja pemerintah menjadi efektif, efisien, dan berdaya jangkau lebih luas	Jumlah kunjungan wisatawan ke TMII anjungan Sulawesi Utara (Orang)	-	-	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Kerjasama antar pemerintah daerah	-	-	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Penghubung	Tidak ada pengaduan masyarakat	-	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan publik Badan penghubung pemprov Sulut di Jakarta)	-	-	Program peningkatan/ fasilitas bidang promosi dan informasi, pendekatan investasi dan keprotokoleran	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah kunjungan wisatawan ke TMII anjungan Sulawesi Utara (orang)	-	18.000	Program pengelolaan dan pemeliharaan TMII dan asrama mahasiswa	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Jumlah kunjungan wisatawan ke TMII anjungan Sulawesi Utara	-	18.000	Program peningkatan/ fasilitasi bidang promosi dan informasi budaya daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan publik Badan penghubung pemprov Sulut di Jakarta)	-	-	Program pelayanan umum keprotokoleran	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Penghubung	
			Meningkatnya kerjasama antar aparaturn pemerintah daerah kabupaten/kota	0 kali	15 kali	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	Sekretariat Daerah	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian		
			Terlaksananya Sistim administrasi kependudukan (SAK) Terpadu	-	15 Kab/kota	Penataan administrasi kependudukan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Setda (biro Pemerintahan dan Humas)	
			Tersedianya informasi managemen kependudukan	-	15 Kab/kota	Penataan administrasi kependudukan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Setda (biro Pemerintahan dan Humas)	
MISI IV: Mewujudkan Masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi.									
4.1	Terwujudnya wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun	Strategi: Pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun	APM PAUD (%)	46	51	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Arah Kebijakan: Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan, dan melaksanakan berbagai upaya yang diperlukan untuk merealisasikan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun	APM SD/MI (%)	92	95	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMP/MTS (%)	75	76	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SD/MI (%)	110	112	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMP/MTS (%)	96	98	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	93	96	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS (%)	77	78	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,5	0,5	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMP/MTS (%)	0,7	0,7	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						tahun			
			Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SD/MI	1:36	1:32	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMP/MTS	1:30	1:33	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMA/MA (%)	80	84	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMA/MA (%)	52	57	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA (%)	51	56	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0,15%	0,001	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Kelulusan SMA/MA (%)	0,50%	0,0038	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMA/MA (%)	75	77	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMA/MA	1:33	1:33	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Non Formal	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Luar Biasa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase Guru SD dan SMP yang memiliki sertifikat pendidik	15% Guru SD ; 20% Guru SMP	20% Guru SD ; 35% Guru SMP	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Wajib Belajar 12 Tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Peningkatan Prestasi Seni, Bakat, Kreatifitas Siswa	12 Medali/ Penghargaan	18 Medali/ Penghargaan	Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase kab/kota yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	15 Kab/kota	15 Kab/kota	Program Balai Latihan Teknologi Komunikasi	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
4.2	Terlaksananya percepatan penuntasan buta aksara	Strategi: Percepatan penuntasan buta aksara  Arah Kebijakan: Mengembangkan program-program yang dibutuhkan untuk mempercepat penuntasan buta aksara	APM PAUD (%)	46	51	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SD/MI (%)	92	95	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMP/MTS (%)	75	76	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SD/MI (%)	110	112	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMP/MTS (%)	96	98	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	93	96	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS (%)	77	78	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,5	0,5	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMP/MTS (%)	0,7	0,7	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rasio Guru/ Murid SD/MI	1:36	1:32	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMP/MTS	1:30	1:33	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMA/MA (%)	80	84	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMA/MA (%)	52	57	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA (%)	51	56	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0,15%	0,001	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SMA/MA (%)	0,50%	0,0038	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMA/MA (%)	75	77	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMA/MA	1:33	1:33	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Non Formal	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Luar Biasa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase Guru SD dan SMP yang memiliki sertifikat pendidik	15% Guru SD ; 20% Guru SMP	20% Guru SD ; 35% Guru SMP	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Wajib Belajar 12 Tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Peningkatan Prestasi Seni, Bakat, Kreatifitas Siswa	12 Medali/ Penghargaan	18 Medali/ Penghargaan	Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase kab/kota yang memiliki rencana dan melaksanakan	15 Kab/kota	15 Kab/kota	Program Balai Latihan Teknologi Komunikasi	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif						
4.3	Terlaksananya pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi	Strategi: Pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi.  Arah Kebijakan: Mengembangkan upaya pemberian beasiswa bagi para peserta didik yang berprestasi untuk mendorong iklim persaingan yang sehat	APM PAUD (%)	46	51	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SD/MI (%)	92	95	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMP/MTS (%)	75	76	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SD/MI (%)	110	112	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMP/MTS (%)	96	98	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	93	96	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS (%)	77	78	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,5	0,5	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMP/MTS (%)	0,7	0,7	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SD/MI	1:36	1:32	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMP/MTS	1:30	1:33	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			APK SMA/MA (%)	80	84	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMA/MA (%)	52	57	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA (%)	51	56	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0,15%	0,001	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SMA/MA (%)	0,50%	0,0038	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMA/MA (%)	75	77	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMA/MA	1:33	1:33	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Non Formal	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Luar Biasa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase Guru SD dan SMP yang memiliki sertifikat pendidik	15% Guru SD ; 20% Guru SMP	20% Guru SD ; 35% Guru SMP	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Wajib Belajar 12 Tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Peningkatan Prestasi Seni, Bakat, Kreatifitas Siswa	12 Medali/ Penghargaan	18 Medali/ Penghargaan	Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase kab/kota yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	15 Kab/kota	15 Kab/kota	Program Balai Latihan Teknologi Komunikasi	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
4.4	Terlaksananya sarana dan mutu	Strategi: Peningkatan jumlah sarana dan mutu pendidikan non	APM PAUD (%)	46	51	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendidikan non formal	formal  Arah Kebijakan: Mengembangkan sarana dan prasarana untuk pendidikan non formal yang lebih berkualitas	APM SD/MI (%)	92	95	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMP/MTS (%)	75	76	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SD/MI (%)	110	112	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMP/MTS (%)	96	98	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	93	96	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS (%)	77	78	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,5	0,5	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMP/MTS (%)	0,7	0,7	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SD/MI	1:36	1:32	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMP/MTS	1:30	1:33	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMA/MA (%)	80	84	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMA/MA (%)	52	57	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA (%)	51	56	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0,15%	0,001	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Kelulusan SMA/MA (%)	0,50%	0,0038	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMA/MA (%)	75	77	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMA/MA	1:33	1:33	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Non Formal	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Luar Biasa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase Guru SD dan SMP yang memiliki sertifikat pendidik	15% Guru SD ; 20% Guru SMP	20% Guru SD ; 35% Guru SMP	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Wajib Belajar 12 Tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Peningkatan Prestasi Seni, Bakat, Kreatifitas Siswa	12 Medali/ Penghargaan	18 Medali/ Penghargaan	Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase kab/kota yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	15 Kab/kota	15 Kab/kota	Program Balai Latihan Teknologi Komunikasi	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
4.5	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan	Strategi: Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan.  Arah Kebijakan: Mengembangkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan dalam rangka pemerataan	APM PAUD (%)	46	51	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SD/MI (%)	92	95	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMP/MTS (%)	75	76	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SD/MI (%)	110	112	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pendidikan yang berkualitas	APK SMP/MTS (%)	96	98	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	93	96	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS (%)	77	78	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,5	0,5	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMP/MTS (%)	0,7	0,7	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rasio Guru/ Murid SD/MI	1:36	1:32	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMP/MTS	1:30	1:33	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMA/MA (%)	80	84	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMA/MA (%)	52	57	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA (%)	51	56	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0,15%	0,001	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SMA/MA (%)	0,50%	0,0038	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMA/MA (%)	75	77	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMA/MA	1:33	1:33	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Non Formal	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Luar Biasa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase Guru SD dan SMP yang memiliki sertifikat pendidik	15% Guru SD ; 20% Guru SMP	20% Guru SD ; 35% Guru SMP	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Wajib Belajar 12 Tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Peningkatan Prestasi Seni, Bakat, Kreatifitas Siswa	12 Medali/ Penghargaan	18 Medali/ Penghargaan	Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Prosentase kab/kota yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan	15 Kab/kota	15 Kab/kota	Program Balai Latihan Teknologi Komunikasi	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif						
4.6	Tersedianya fasilitas pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar sembilan tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa	Strategi: Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar sembilan tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan non formal  Arah Kebijakan: Menambah dan memelihara serta meningkatkan fasilitas pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar sembilan tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan non formal	APM PAUD (%)	46	51	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SD/MI (%)	92	95	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APM SMP/MTS (%)	75	76	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SD/MI (%)	110	112	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMP/MTS (%)	96	98	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	93	96	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS (%)	77	78	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,5	0,5	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Putus Sekolah SMP/MTS (%)	0,7	0,7	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SD/MI (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMP/MTS (%)	98	99	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SD/MI	1:36	1:32	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMP/MTS	1:30	1:33	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			APK SMA/MA (%)	80	84	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			APM SMA/MA (%)	52	57	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA (%)	51	56	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0,15%	0,001	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Kelulusan SMA/MA (%)	0,50%	0,0038	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melanjutkan SMA/MA (%)	75	77	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Rasio Guru/ Murid SMA/MA	1:33	1:33	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Pendidikan Menengah	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Non Formal	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Luar Biasa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.7	Terwujudnya pendidikan budi pekerti sejak dini	Strategi: Penerapan pendidikan budi pekerti sejak dini  Arah Kebijakan: Mendorong penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah maupun pendidikan non formal untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki tata krama yang baik serta berakhlak mulia	Peningkatan Prestasi Seni, Bakat, Kreatifitas Siswa	12 Medali/ Penghargaan	18 Medali/ Penghargaan	Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
4.8	Terlaksananya peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan dan kearsipan	Strategi: Peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan dan kearsipan  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan jumlah dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan penguasaan ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana kearsipan	Tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan	-	6000 arsip	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Wajib - Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	
			Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	-	5000 books	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Wajib kearsipan	Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	
			Terpeliharanya arsip daerah	-	5000 books	Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	Wajib kearsipan	Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	
			Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip daerah	-	15 paket	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Wajib kearsipan	Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-	-	-	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Wajib kearsipan	Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	
4.9	Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan, geothermal dan vulkanologi di Indonesia Timur	Strategi: Perwujudan Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan, geothermal dan vulkanologi di Indonesia Timur  Arah Kebijakan: Mendorong upaya menjadikan Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan, geothermal, dan vulkanologi di Indonesia Timur dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya daerah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
4.10	Terlaksananya manajemen berbasis sekolah	Strategi: Peningkatan dan pemantapan manajemen berbasis sekolah.  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan manajemen berbasis sekolah untuk menghasilkan sistem pendidikan yang selaras dengan era global	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.11	Terlaksananya mutu pendidikan kesehatan, kejuruan, dan politeknik	Strategi: Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan, kejuruan, dan politeknik  Arah Kebijakan: Meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan kejuruan dan politeknik	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	5 Kabupaten/ Kota	15 Kabupaten/ Kota	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Diknas
			Prosentase kab/kota yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	15 Kab/kota	15 Kab/kota	Program Balai Latihan Teknologi Komunikasi	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
4.12	Terlaksananya standar infrastruktur sekolah-sekolah	Strategi: Pengembangan dan peningkatan standar infrastruktur sekolah-sekolah  Arah Kebijakan: Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara fasilitas sekolah-sekolah sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif untuk pencapaian prestasi peserta didik yang lebih baik serta pembentukan sikap dan perilaku	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.13	Terlaksananya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Strategi: Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan  Arah Kebijakan: Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mencerdaskan masyarakat	Prosentase Guru SD dan SMP yang memiliki sertifikat pendidik	15% Guru SD ; 20% Guru SMP	20% Guru SD ; 35% Guru SMP	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
4.14	Terwujudnya laboratorium penelitian terpadu	Strategi: Pengembangan laboratorium penelitian terpadu  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan laboratorium penelitian terpadu untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dunia				Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
4.15	Terlaksananya Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Strategi: Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK  Arah Kebijakan: Mendorong peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK untuk meningkatkan daya saing masyarakat Sulawesi Utara dalam persaingan global	Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Non Formal	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.16	Terwujudnya kelembagaan sekolah yang berstandar nasional dan internasional	Strategi: Pengadaan dan pengembangan kelembagaan sekolah yang berstandar nasional dan internasional.  Arah Kebijakan: Mendorong berkembangnya sekolah yang berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sulawesi Utara	Angka Melek Huruf	99,50%	99,90%	Program Pendidikan Luar Biasa	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
4.17	Terlaksananya peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan	Strategi: Peningkatan dan perluasan peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan  Arah Kebijakan: Meningkatkan dan memperluas peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,75	9,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib - Pendidikan	Dinas Diknas	
4.18	Terlaksananya prestasi dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional serta kesejahteraan atlet-atlit daerah	Strategi: Peningkatan prestasi dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional serta kesejahteraan atlet-atlit daerah  Arah Kebijakan: Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi atlet dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional sebagai sarana untuk promosi daerah serta	Cakupan wilayah peningkatan peran serta kepemudaan; jumlah pemuda dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, pemilihan pemuda pelopor, aksi bakti sosial, pembinaan dan pendidikan dasar-dasar kepemimpinan kepemudaan	11 Kab/Kota /4 keg / 1280 org	15 Kab/Kota / 1800 orang	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Wajib – Olah Raga	Dispora	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		upaya meningkatkan kesejahteraan atlit-atlit daerah untuk menghasilkan atlit-atlit daerah yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional							
4.19	Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional maupun internasional melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga berstandar Internasional serta mempersiapkan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen olahraga nasional	<p>Strategi: Penyiapan Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional maupun internasional melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga berstandar Internasional serta mempersiapkan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen olahraga nasional.</p> <p>Arah Kebijakan: Mengembangkan Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional maupun internasional lewat pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga berstandar internasional</p>	Cakupan wilayah pembangunan, pemantauan, pendataan, konsultasi dan monitoring sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan; jumlah kegiatan dan paket pengadaan	2 keg / 4 Kab/Kota / 20 orang	15 Kab/Kota / 4 keg	program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Wajib – Olah Raga	Dispora	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.20	Terwujudnya pemuda yang berwawasan kebangsaan	Strategi: Peningkatan wawasan Kebangsaan bagi pemuda dan atlet berprestasi  Arah Kebijakan: Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi pemuda dalam kehidupan bernegara	Cakupan wilayah pembangunan, pemantauan, pendataan, konsultasi dan monitoring sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan; jumlah kegiatan dan paket pengadaan	2 keg / 4 Kab/Kota / 20 orang	15 Kab/Kota / 4 keg	program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Wajib – Olah Raga	Dispora	
4.21	Terwujudnya pengembangan teknologi informasi kesehatan	Strategi: Pengembangan teknologi informasi kesehatan  Arah Kebijakan: Mengimplementasikan teknologi informasi kesehatan untuk tenaga medis maupun staf kesehatan	Penduduk Mempunyai Jaminan (Universal Coverage)	53,40%	90%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Wajib-kesehatan	Dinas Kesehatan	
4.22	Terwujudnya kesejahteraan bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan	Strategi: Perlakuan khusus bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan  Arah Kebijakan: Meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan, kejuruan, dan politeknik	Penduduk Mempunyai Jaminan (Universal Coverage)	53,40%	90%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	Badan Pengelola Perbatasan
4.23	Terwujudnya perhatian pada fasilitas kesehatan (formal dan	Strategi: Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas kesehatan (formal dan	Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	80%	100%	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	informal)	informal)  Arah Kebijakan: Menambah dan melakukan maintainance untuk peningkatan fasilitas kesehatan (formal dan informal)	Persentase Puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar sebesar 90 %	90%	90%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melayani kesehatan jiwa & Napza	2	12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Jumlah RS PONEK	5	11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			RS Akreditasi	4	20	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	50%	75%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	65%	90%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Persentase Balita Naik Berat Badan (N/S)	65%	90%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			% Penduduk Yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	53,1%	70%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			% Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	62,26%	80%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk (IR)	40/100000	40/100000	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Case Fatality Rate (CFR)	<1	<1	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Angka Kasus Kematian Rabies	0	0%	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			% Kab/Kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman	20%	100%	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			% penduduk >15 menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	10,9%	45%	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasar pengakuan pemakai)	30%	60%	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Jumlah kasus baru TB per 100.000 penduduk	235	222	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Proporsi kasus TBC paru yang terdeteksi dalam program DOTS	80,0%	>90%	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Proporsi kasus TBC paru yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%	98%	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Angka Penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API)	6,04	1	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan	100%	1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tetanganinya Penderita Katarak	100%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu	100%	100%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana BKMM Dalam Persiapan Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat	95%	95%	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana BKMM Dalam Persiapan Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata	95%	95%	Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Masyarakat			Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata			
			Penduduk Mempunyai Jaminan (Universal Coverage)	53,40%	90%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Kunjungan Neonatal Lengkap	75,00%	90%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Kunjungan Bayi	73,63%	91%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan Anak Balita	60,23	87%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I SD	59,95	95%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Puskesmas Mampu Laksana PKPR	36%	92%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Lansia	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal K4	82%	95%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Presentase Ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	81,79%	100%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Teknologi SIKDA	3	600%	Program Penyediaan Data Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tersedianya Data Informasi Kesehatan yang Avidance Base	16 Profil Kesehatan	16 Profil Kesehatan	Program Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tertanganinya Kejadian Luar Biasa < 24 Jam	95%	95%	Program Surveilans Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				-	-	Program Upaya Ketahanan Tubuh Laboran	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya Kemampuan SDM dalam penanggulangan gawat darurat bencana	100%	100%	Program Penanggulangan Wabah dan Bencana	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terkontrolnya Kesehatan Jemaah Haji	100%	100%	Program Kesehatan Haji	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Kabupaten/ Kota yang mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	5 Kabupaten/ Kota	15 Kabupaten/ Kota	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
4.24	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan	Strategi: Peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan.  Arah Kebijakan: Meningkatkan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan	Penduduk Mempunyai Jaminan (Universal Coverage)	53,40%	90%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Wajib-Kesehatan	Dinas Kesehatan	
<b>MISI V:</b> <b>Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional, dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).</b>									
5.1	Terwujudnya database perekonomian dan pusat informasi bisnis,	Strategi: Penyiapan dan pelengkapan database perekonomian dan pusat informasi bisnis	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	586,7	785,2	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Pilihan – Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	termasuk <i>database</i> usaha mikro	Arah Kebijakan: Mengembangkan upaya untuk menyediakan <i>database</i> perekonomian yang lebih akurat serta pusat informasi bisnis dalam rangka menarik investasi dan mendukung kegiatan dunia usaha	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah	53.461	58.807	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Menengah	Wajib-Koperasi .UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
5.2	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK	Strategi: Penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK  Arah Kebijakan: Mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK	Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7.7	8.09	Program Penataan Struktur industri	Pilihan – Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Wajib -Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Bappeda	Setda (Biro Ekonom)i ; Bappeda	
			Meningkatnya Penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	-	- SLHD 5 dok - Rakor PLH 5 keg - Pekan link 5 keg - pameran dan promosi 5 keg	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Wajib – Lingkungan Hidup	BLH	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3	Terlaksananya deregulasi Peraturan Daerah (PERDA) yang menghambat investasi dan menetapkan PERDA yang mendorong akselerasi perekonomian daerah	Strategi: Pelaksanaan deregulasi Peraturan Daerah (PERDA) yang menghambat investasi dan menetapkan PERDA yang mendorong akselerasi perekonomian daerah  Arah Kebijakan: Melakukan kaji ulang terhadap berbagai Peraturan Daerah (PERDA) yang dianggap dapat menghambat investasi agar kebijakan deregulasi yang dilakukan akan lebih tepat dan terarah	Meningkatnya Jumlah Ijin dan non ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	507 Ijin	-	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Wajib – Pelayanan perijinan terpadu	KPPT	
5.4	Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership)	Strategi: Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership)  Arah Kebijakan: Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta untuk menciptakan sinergitas yang kokoh dalam membangun Sulawesi Utara berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang dimiliki serta sejalan dengan kebijakan pemerintah	Jumlah Wirausaha Baru	2.356	3.591	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Kecil Menengah	Wajib – Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
			Jumlah Koperasi Aktif	3.292	3.621	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koprasi	Wajib – Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Terlaksananya aksesibilitas permodalan, pemasaran, dan teknologi	Strategi: Peningkatan aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi  Arah Kebijakan: Mendorong pihak-pihak terkait untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap modal, pasar, dan teknologi tepat guna	Jumlah Unit Usaha (UU);	9.088	11.599	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perindustrian dan perdagangan	Disperindag	
			Jumlah Tenaga Kerja (org);	31.569	38.409	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perindustrian dan perdagangan	Disperindag	
			Nilai Investasi (Rp. Milyar)	76.6	97.8	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perindustrian dan perdagangan	Disperindag	
5.6	Terlaksananya promosi produk UMKM	Strategi: Peningkatan promosi produk UMKM  Arah Kebijakan: Mengembangkan upaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk melakukan promosi UMKM agar memperkuat pasar para pelaku UMKM tersebut	Jumlah Wirausaha Baru	2.356	3.591	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Kecil Menengah	Wajib- Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.7	Terlaksananya penguasaan teknologi	Strategi: Peningkatan penguasaan teknologi  Arah Kebijakan: Mendorong penggunaan dan penguasaan teknologi tepat guna, baik di kalangan pemerintah di Sulawesi Utara, kalangan bisnis, dan para petani	Jumlah Wirausaha Baru	2.356	3.591	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Kecil Menengah	Wajib- Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
5.8	Terwujudnya kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba ( <i>franchise</i> ), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan ( <i>joint venture</i> ), bagi hasil, dan penyumberluan ( <i>outsourcing</i> )	Strategi: Pemantapan dan peningkatan kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba ( <i>franchise</i> ), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan ( <i>joint venture</i> ), bagi hasil, dan penyumberluan ( <i>outsourcing</i> )  Arah Kebijakan: Memantapkan dan meningkatkan kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba ( <i>franchise</i> ), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan ( <i>joint venture</i> ), bagi hasil, dan penyumberluan ( <i>outsourcing</i> )	Jumlah Wirausaha Baru	2.356	3.591	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Kecil Menengah	Wajib - Koperasi	Dinas KUMKM	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.9	Terwujudnya wiraswasta perempuan dan pemuda lokal ( <i>local women and young entrepreneur</i> )	Strategi: Penciptaan wiraswasta perempuan dan pemuda lokal ( <i>local women and young entrepreneur</i> )  Arah Kebijakan: Mendorong upaya pembentukan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda serta mendorong pengembangan kegiatan usaha para wiraswasta muda dalam mengakselerasikan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	5	14	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Wajib – pemberdayaan perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan	
5.10	Terlaksananya fungsi kelembagaan Koperasi	Strategi: Pemantapan dan optimalisasi fungsi kelembagaan koperasi  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan koperasi yang berkualitas untuk menjadi sokoguru yang solid bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan anggotanya	Jumlah Koperasi Aktif	3.292	3.621	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koprasi	Wajib – Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
			Jumlah Wirausaha Baru	2.356	3.591	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Kecil Menengah	Wajib - Koperasi	Dinas KUMKM	
			Jumlah Unit Usaha (UU);	9.088	11.599	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Tenaga Kerja (org);	31.569	38.409	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai Investasi (Rp. Milyar)	76.6	97.8	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai Ekspor (US\$ Juta)	586,7	785,2	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Pilihan – Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7,70	8,09	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pilihan – Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5.11	Terwujudnya peningkatan jumlah koperasi aktif, UMKM dan wirausaha baru	Strategi: Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kewirausahaan baru serta pengembangan sistem usaha bagi KUKM  Arah Kebijakan: Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kewirausahaan baru serta pengembangan	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah	53.461	58.807	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Wajib _ Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
			Jumlah Wirausaha Baru	2.356	3.591	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Kecil Menengah	Wajib _ Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sistem usaha bagi KUKM	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah	53.461	58.807	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Menengah	Wajib _ Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
			Jumlah Koperasi Aktif	3.292	3.621	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koprasi	Wajib _ Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
5.12	Terwujudnya ekonomi kreatif lokal	Strategi: Pengembangan ekonomi kreatif lokal  Arah Kebijakan: Mengembangkan ekonomi kreatif lokal bercirikan produk unggulan daerah	Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	14,44% ( Dari jumlah 1733 Desa/ kel/ 12 Desa/Kel terbaik x 100%)	15,22 % ( Dari Jumlah 1827 Desa/Kel terdiri dari 1495 desa 332 kel / 12 Desa/Kel x 100%)	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Wajib - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	BPM-PD	
			Proporsi desa yang mempunyai kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif	47 % dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	47% dari 241/503(dihitun g dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan	Wajib - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	BPM-PD	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	0.71 % dari 10/1401X100% ( Dari 159 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1401 desa tahun 2010 x 100%)	0,69 % 10/1495X100% ( Dari 162 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1495 desa tahun 2015 x 100%)	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	Wajib - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	BPM-PD	
			Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	2,42% ( Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec / 70 PJO yg dilatih x 100%) <b>apa jlh kec,desa sasaran atau total kec,desa se prov sulut</b>	1,7 % (Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec /100 PJO yg dilatih x 100%)	Program Nasional pemberdayaan masyarakat	Wajib - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	BPM-PD	
			Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah	53.461	58.807	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	Wajib – Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
			Jumlah Wirausaha Baru	2.356	3.591	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Kecil Menengah	Wajib – Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
			Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah	53.461	58.807	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Menengah	Wajib – Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Koperasi Aktif	3.292	3.621	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koprasi	Wajib – Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	
<b>MISI VI: Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.</b>									
6.1	Terwujudnya sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota	Strategi: Penyediaan sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota  Arah Kebijakan: Mempersiapkan sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta mendukung kegiatan usaha dan pariwisata lewat informasi yang kredibel	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara	0 Meter	201.039 Meter	Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Tersedianya Buku Perencanaan Untuk Pembangunan Pelabuhan	2 Buku Perencanaan	20 Buku Perencanaan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi	-	60 Kegiatan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Tersedianya Fasilitas LLAJ	-	-	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Meningkatnya Pemahaman Pengemudi Angkutan Umum Terhadap Aturan Dalam Berkendaraan	100%	100%	Program peningkatan pelayanan angkutan	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah Informasi Yang Tersedia	1 Paket dan 12 Kegiatan	5 Paket dan 60 Kegiatan	Program kerjasama informasi dengan mas media	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Tersedianya Rambu - Rambu Lalu Lintas Untuk Mengurangi Kecelakaan	50 Rambu Lalu Lintas	1521 Rambu Lalu Lintas ; 50.000 Marka Jalan ; 6524 Meter Pagar Pengaman Jalan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sulut	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	Program pengembangan keterbukaan informasi	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
						Program Pengembangan Data/ Informasi	Wajib - Perencanaan Pembangunan	Bappeda	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Perencanaan Tata Ruang	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Kerjasama Pembangunan	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Pengembangan Data/ Informasi	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Tata Ruang	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
6.2	Terlaksananya <i>e-Government</i>	Strategi: Pemantapan pelaksanaan <i>e-Government</i>  Arah Kebijakan: Mendorong penerapan lebih lanjut <i>e-Government</i> untuk mendorong kecepatan dan keandalan informasi pemerintah serta meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan publik				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Setda (Biro Pembangunan)	
			Prosentase pengelolaan/penatausahaan keuangan, administrasi dan dokumen aset sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	90%	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prosentasi pelayanan terhadap masyarakat/wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan SAMSAT online	80%	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	
			Prosentase PNS Dinas Pendapatan Daerah yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Pendapatan Daerah	90%	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	
			Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak sesuai target yg ditetapkan	100%	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak	100%	-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah **	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	
			Prosentase target penerimaan pendapatan daerah yang harus direalisasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	100%	100%	Program penelitian dan pengembangan pendapatan daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	
			Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak	100%	100%	Program intensifikasi pengelolaan pajak daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				100%	-	Program ekstensifikasi sumber retribusi daerah	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	
			Prosentase unit pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan tertib administrasi pengelolaan penerimaan, penatausahaan anggaran belanja, aset/barang inventaris dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	Program pengawasan pengelolaan pendapatan daerah, aset dan personil	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	
			Prosentase dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang diterima Provinsi Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota	100%	100%	Program optimalisasi pengelolaan dana perimbangan	Wajib - Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dispenda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.3	Terwujudnya fasilitas media massa	Strategi: Penyediaan fasilitas media massa  Arah Kebijakan : Mendorong pengembangan fasilitas media massa yang representatif agar informasi disampaikan lebih berkualitas	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara	0 Meter	201.039 Meter	Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Tersedianya Buku Perencanaan Untuk Pembangunan Pelabuhan	2 Buku Perencanaan	20 Buku Perencanaan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi	-	60 Kegiatan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Tersedianya Fasilitas LLAJ	-	-	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Meningkatnya Pemahaman Pengemudi Angkutan Umum Terhadap Aturan Dalam Berkendara	100%	100%	Program peningkatan pelayanan angkutan	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Informasi Yang Tersedia	1 Paket dan 12 Kegiatan	5 Paket dan 60 Kegiatan	Program kerjasama informasi dengan mas media	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Tersedianya Rambu - Rambu Lalu Lintas Untuk Mengurangi Kecelakaan	50 Rambu Lalu Lintas	1521 Rambu Lalu Lintas ; 50.000 Marka Jalan ; 6524 Meter Pagar Pengaman Jalan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sulut	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	Program pengembangan keterbukaan informasi	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
6.4	Terlaksananya sistem informasi <i>online</i>	Strategi: Pengembangan sistem informasi <i>online</i>  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan sistem informasi <i>online</i> untuk mempercepat penyampaian informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan	Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi	-	60 Kegiatan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah Informasi Yang Tersedia	1 Paket dan 12 Kegiatan	5 Paket dan 60 Kegiatan	Program kerjasama informasi dengan mas media	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sulut	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	Program pengembangan keterbukaan informasi	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
6.5	Meningkatnya proporsi masyarakat pengguna Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Strategi: Pengembangan proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi  Arah Kebijakan: Mendorong proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi	Tersedianya Buku Perencanaan Untuk Pembangunan Pelabuhan	2 Buku Perencanaan	20 Buku Perencanaan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi	-	60 Kegiatan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Jumlah Informasi Yang Tersedia	1 Paket dan 12 Kegiatan	5 Paket dan 60 Kegiatan	Program kerjasama informasi dengan mas media	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	
			Tersedianya Rambu - Rambu Lalu Lintas Untuk Mengurangi Kecelakaan	50 Rambu Lalu Lintas	1521 Rambu Lalu Lintas ; 50.000 Marka Jalan ; 6524 Meter Pagar Pengaman Jalan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Wajib - Kominfo	Dishub dan Kominfo	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MISI VII:</b> <b>Meningkatkan pembangunan di Kawasan Perbatasan</b>									
7.1	Terlaksananya pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan	Strategi: Peningkatan pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan  Arah Kebijakan: Mendorong koordinasi antar institusi-institusi yang berhubungan dengan masalah keamanan untuk mengamankan wilayah perbatasan dari gangguan-gangguan dan mencegah masuknya pelaku kejahatan trans nasional	-	-	-	Program pengembangan wilayah perbatasan		Badan Pengelola Perbatasan	
			-	-	-	Program pengembangan data/ informasi		Badan Pengelola Perbatasan	
			-	-	-	Program pengelolaan batas negara		Badan Pengelola Perbatasan	
			-	-	-	Program kerjasama daerah perbatasan		Badan Pengelola Perbatasan	
			-	-	-	Program pengelolaan infrastruktur kawasan		Badan Pengelola Perbatasan	
			-	-	-	Program pengelolaan potensi kawasan		Badan Pengelola Perbatasan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2	Terlaksananya perdagangan lintas batas	Strategi: Peningkatan perdagangan lintas batas  Arah kebijakan: Mendorong pengembangan perdagangan lintas batas untuk meningkatkan perekonomian daerah perbatasan serta daerah yang lain di Sulawesi Utara	Persentase Penyelesaian pengaduan/ sengketa (%)	-	100%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	Badan Pengelola Perbatasan
			Nilai PDRB Sektor Perdagangan (%)	16.30	17.16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	
			Pelayanan Tera dan Tera ulang alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Jumlah UTTP)	13.373	15.503	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	
			Jumlah Unit Usaha (UU);	9.088	11.599	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	
			Jumlah Tenaga Kerja (org);	31.569	38.409	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	
			Nilai Investasi (Rp. Milyar)	76.6	97.8	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nilai Ekspor (US\$ Juta)	586,7	785,2	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7.7	8.09	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7.7	8.09	Program Penataan Struktur industri	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	
			Persediaan kebutuhan barang pokok dan stok kebutuhan barang strategis (Laporan Prognosa)	Cukup Tersedia	Laporan Prognosa	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7,70	8,09	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	
			Nilai PDRB Sektor Perdagangan (%)	16.30	17.16	Program Pembinaan Standarisasi dalam rangka reakreditasi	Pilihan – Perdagangan	Disperindag	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Bappeda	
						Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Bappeda	
						Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar		Bappeda	
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Bappeda	
						Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam		Bappeda	
						Program Pengembangan Data/ Informasi		Bappeda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu		Bappeda	
7.3	Terciptanya jalur transportasi lintas batas baik udara maupun laut	Strategi: Pemantapan dan pembukaan jalur transportasi lintas batas baik udara maupun laut  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan jalur transportasi lintas batas untuk meningkatkan arus barang dan jasa serta manusia	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara	0 Meter	201.039 Meter	Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Wajib-Perhubungan	Dinas Perhubungan	Badan Perbatasan
			Tersedianya Buku Perencanaan Untuk Pembangunan Pelabuhan	2 Buku Perencanaan	20 Buku Perencanaan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Wajib-Perhubungan	Dinas Perhubungan	
			Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi	-	60 Kegiatan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Wajib-Perhubungan	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Fasilitas LLAJ	-	-	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Wajib-Perhubungan	Dinas Perhubungan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MISI VIII:</b> <b>Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik</b>									
8.1	Terwujudnya navigasi pelabuhan Samudera Bitung	Strategi: Pembangunan dan peningkatan fasilitas serta penambahan sarana bantu navigasi pelabuhan Samudera Bitung  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan fasilitas utama dan pendukung pelabuhan Samudera Bitung agar lebih siap untuk menjadi <b>International Hub Port (IHP)</b>	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara	0 Meter	201.039 Meter	Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Tersedianya Buku Perencanaan Untuk Pembangunan Pelabuhan	2 Buku Perencanaan	20 Buku Perencanaan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi	-	60 Kegiatan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Tersedianya Fasilitas LLAJ	-	-	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya Pemahaman Pengemudi Angkutan Umum Terhadap Aturan Dalam Berkendara	100%	100%	Program peningkatan pelayanan angkutan	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah Informasi Yang Tersedia	1 Paket dan 12 Kegiatan	5 Paket dan 60 Kegiatan	Program kerjasama informasi dengan mas media	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Tersedianya Rambu - Rambu Lalu Lintas Untuk Mengurangi Kecelakaan	50 Rambu Lalu Lintas	1521 Rambu Lalu Lintas ; 50.000 Marka Jalan ; 6524 Meter Pagar Pengaman Jalan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sulut	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	Program pengembangan keterbukaan informasi	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
8.2	Terlaksananya jaringan pelayaran dan penerbangan internasional	Strategi: Pembangunan dan perluasan jaringan pelayaran dan penerbangan internasional  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan fasilitas pelabuhan-pelabuhan lain di Sulawesi Utara untuk mendukung sistem transportasi laut dan udara yang lebih komprehensif di Sulawesi Utara	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara	0 Meter	201.039 Meter	Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Tersedianya Buku Perencanaan Untuk Pembangunan Pelabuhan	2 Buku Perencanaan	20 Buku Perencanaan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi	-	60 Kegiatan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Tersedianya Fasilitas LLAJ	-	-	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Meningkatnya Pemahaman Pengemudi Angkutan Umum Terhadap Aturan Dalam Berkendara	100%	100%	Program peningkatan pelayanan angkutan	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah Informasi Yang Tersedia	1 Paket dan 12 Kegiatan	5 Paket dan 60 Kegiatan	Program kerjasama informasi dengan mas media	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Tersedianya Rambu - Rambu Lalu Lintas Untuk Mengurangi Kecelakaan	50 Rambu Lalu Lintas	1521 Rambu Lalu Lintas ; 50.000 Marka Jalan ; 6524 Meter Pagar Pengaman Jalan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sulut	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	Program pengembangan keterbukaan informasi	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
8.3	Terlaksananya keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Sam Ratulangi	Strategi: Peningkatan fasilitas penumpang, barang, dan keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Sam Ratulangi  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan fasilitas Bandara International Sam Ratulangi agar dapat lebih menarik bagi maskapai domestik maupun internasional serta meningkatkan kenyamanan bagi pemakai bandara	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara	0 Meter	201.039 Meter	Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Tersedianya Buku Perencanaan Untuk Pembangunan Pelabuhan	2 Buku Perencanaan	20 Buku Perencanaan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi	-	60 Kegiatan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Tersedianya Fasilitas LLAJ	-	-	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya Pemahaman Pengemudi Angkutan Umum Terhadap Aturan Dalam Berkendara	100%	100%	Program peningkatan pelayanan angkutan	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah Informasi Yang Tersedia	1 Paket dan 12 Kegiatan	5 Paket dan 60 Kegiatan	Program kerjasama informasi dengan mas media	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Tersedianya Rambu - Rambu Lalu Lintas Untuk Mengurangi Kecelakaan	50 Rambu Lalu Lintas	1521 Rambu Lalu Lintas ; 50.000 Marka Jalan ; 6524 Meter Pagar Pengaman Jalan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sulut	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	Program pengembangan keterbukaan informasi	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo	
8.4	Terciptanya lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Strategi: Penyiapan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  Arah Kebijakan: Mengembangkan berbagai upaya untuk menghadirkan Kawasan Ekonomi (KEK) di Sulawesi Utara dan memperkuat kawasan-kawasan pendukungnya lewat penyiapan lahan serta infrastruktur pendukung				Program Pengembangan Data/ Informasi	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Tata Ruang	Wajib- Penataan ruang	Bappeda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Kerjasama Pembangunan		Bappeda	
						Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Bappeda	
						Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
						Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar		Bappeda	
						Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Bappeda	
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Bappeda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Bappeda	
						Program Perencanaan Sosial dan Budaya		Bappeda	
						Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam		Bappeda	
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana		Bappeda	
						Program Pengembangan Data/ Informasi		Bappeda	
						Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah		Bappeda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		Bappeda	
						Program Perencanaan Tata Ruang		Bappeda	
						Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu		Bappeda	
			Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan	8,86 km panjang jalan	-	Program Peningkatan Jalan & Jembatan		Dinas PU	
			Tersedianya tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum		56 ha luas tanah	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		Dinas PU	
			Terlaksanakannya program pengendalian pemanfaatan ruang melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dengan	15 kab/kota	-	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Dinas PU	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			instrumen Standar Pelayan Minimum (SPM) Bidang Penataan Ruang						
			Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	68,23 km dari 940.330 km	95,36 km dari 940.330 km	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Dinas PU	
			Terinspeksinya kondisi jalan dan jembatan	940,33 km	940,33 km	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		Dinas PU	
			Tersusunnya database jalan dan jembatan	940,33 km	940,33 km	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan		Dinas PU	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan laboratorium, alat berat dan perbengkelan	1 unit alat berat	4 unit alat berat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		Dinas PU	
				1 unit alat laboratorium	3 unit alat laboratorium			Dinas PU	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada	1367,92 ha persawahan	2282,12 ha persawahan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		Dinas PU	
			Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 drainase desa/ kelurahan	67 titik drainase di jalan propinsi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Dinas PU	
				7 SPAM desa/ kelurahan				Dinas PU	
			Terjaminnya keselamatan jiwa dan pemukiman masyarakat pesisir dari terjangan ombak/ gelombang	4 meter talud pengaman pantai	-	Program Pengendalian Banjir		Dinas PU	
			Terlaksananya perencanaan pengembangan infrastruktur		1 PJU kantor dinas	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Dinas PU	
			Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman	10 ha lahan untuk infrastruktur 22 revitalisasi permukiman desa/ kelurahan	67 titik drainase di jalan propinsi	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Dinas PU Dinas PU	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terlaksananya proses penyusunan kebijakan penataan ruang berupa penyusunan RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi, melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dalam forum konsultasi publik, sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis yang memenuhi syarat inklusif, dan meningkatnya tingkat pengetahuan aparatur penataan ruang	15 kab/kota	-	Program Perencanaan untuk Tata Ruang		Dinas PU	
			Tersusunnya kebijakan pengendalian ruang		15 kab/kota	Program Pengendalian Ruang		Dinas PU	
			Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan		120 (m) jembatan	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		Dinas PU	
			Persentase Penyelesaian pengaduan/ sengketa (%)	-	100%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU.	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.5	Terlaksananya kerjasama dan sosialisasi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang kepada propinsi-propinsi tetangga, pelaku bisnis (eksportir dan importir), perusahaan pelayaran Internasional— <i>Main line Operator (MLO)</i> —dan nasional	Strategi: Pelaksanaan kerjasama dan sosialisasi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang kepada propinsi-propinsi tetangga, pelaku bisnis (eksportir dan importir), perusahaan pelayaran Internasional— <i>Main line Operator (MLO)</i> —dan nasional  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan bandara-bandara perintis di kabupaten kepulauan untuk mendukung lalu lintas manusia serta barang dan jasa terutama bila kondisi laut tidak memungkinkan dan mengembangkan berbagai upaya sosialisasi dan kerjasama dengan provinsi-provinsi tetangga dan perusahaan pelayaran nasional dan internasional untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (%)	16.30	17.16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	
			Pelayanan Tera dan Tera ulang alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Jumlah UTPP)	13.373	15.503	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	
			Jumlah Unit Usaha (UU);	9.088	11.599	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	
			Jumlah Tenaga Kerja (org);	31.569	38.409	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	
			Nilai Investasi (Rp. Milyar)	76.6	97.8	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nilai Ekspor (US\$ Juta)	586,7	785,2	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7.7	8.09	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7.7	8.09	Program Penataan Struktur industri	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	
			Persediaan kebutuhan barang pokok dan stok kebutuhan barang strategis (Laporan Prognosa)	Cukup Tersedia	Laporan Prognosa	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7,70	8,09	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	
			Nilai PDRB Sektor Perdagangan (%)	16.30	17.16	Program Pembinaan Standarisasi dalam rangka reakreditasi	Pilihan - perdagangan	Disperindag, koperasi UMKM. Dishub dan Kominfo; Dinas PU	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.6	Terwujudnya peran sektor swasta serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif terlibat dalam bisnis nasional dan internasional	<p>Strategi: Peningkatan peran sektor swasta serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif terlibat dalam bisnis nasional dan internasional</p> <p>Arah Kebijakan: Mendorong pihak swasta daerah serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional sehingga dapat memberi nilai tambah yang lebih besar bagi daerah</p>	Persentase Penyelesaian pengaduan/ sengketa (%)	-	100%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai PDRB Sektor Perdagangan (%)	16.30	17.16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Pelayanan Tera dan Tera ulang alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Jumlah UTPP)	13.373	15.503	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Jumlah Unit Usaha (UU);	9.088	11.599	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Jumlah Tenaga Kerja (org);	31.569	38.409	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai Investasi (Rp. Milyar)	76.6	97.8	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nilai Ekspor (US\$ Juta)	586,7	785,2	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7.7	8.09	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7.7	8.09	Program Penataan Struktur industri	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persediaan kebutuhan barang pokok dan stok kebutuhan barang strategis (Laporan Prognosa)	Cukup Tersedia	Laporan Prognosa	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7,70	8,09	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Nilai PDRB Sektor Perdagangan (%)	16.30	17.16	Program Pembinaan Standarisasi dalam rangka reakreditasi	Pilihan – Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.7	Terwujudnya peningkatan investasi di daerah	Strategi: Meningkatkan Promosi dan peluang investasi serta Meninngkatkan pelayanan investor untuk memperlancar investasi didaerah.  Arah Kebijakan: Memperbaiki iklim investasi di daerah dengan mempermudah ketentuan syarat penanaman modal, memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi serta insentif bagi investor	Terlaksananya Promosi Investasi	-	100%	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi		Badan Koordinasi Penanaman Modal	
			Terciptanya realisasi Investasi	-	100%	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Badan Koordinasi Penanaman Modal	
			Tersedianya kajian Potensi Unggulan daerah	-	100%	program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		Badan Koordinasi Penanaman Modal	
<b>MISI IX: Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara</b>									
9.1	Terlaksananya pembenahan sarana dan prasarana pariwisata	Strategi: Pembenahan sarana dan prasarana pariwisata  Arah Kebijakan: Mendorong dan berpartisipasi dalam pembenahan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang mencakup situs-situs wisata, perhubungan ke lokasi wisata, pusat cenderamata, dan pusat informasi pariwisata	Cakupan informasi potensi kebudayaan dan pariwisata melalui pameran promosi di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kegiatan MICE	0%	100%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pilihan – Disparbud	Disparbud	
			Proporsi objek wisata kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan serta keterlibatan masyarakat dan	0%	100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pilihan – Disparbud	Disparbud	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			stakeholder terkait dalam meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan						
			Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam menerapkan sadar wisata	0%	100%	Program Pengembangan Kemitraan	Pilihan – Disparbud	Disparbud	
			Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kekayaan budaya daerah	0%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pilihan – Disparbud	Disparbud	
			Pelestarian Budaya sebagai daya tarik wisata dengan melibatkan generasi muda serta tokoh masyarakat	0%	100%	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pilihan – Disparbud	Disparbud	
			Jumlah seniman, dan potensi seni, serta jumlah kreasi yang dapat dipentaskan	0%	100%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pilihan – Disparbud	Disparbud	
9.2	Terlaksananya peran dan fungsi badan promosi pariwisata	Strategi: Pemantapan peran dan fungsi badan promosi pariwisata Arah Kebijakan: Memantakan peran dan fungsi badan promosi	Cakupan informasi potensi kebudayaan dan pariwisata melalui pameran promosi di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kegiatan MICE	0%	100%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pilihan – Pariwisata	Disparbud	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pariwisata	Proporsi objek wisata kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan serta keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan	0%	100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pilihan – Pariwisata	Disparbud	
			Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam menerapkan sadar wisata	0%	100%	Program Pengembangan Kemitraan	Pilihan – Pariwisata	Disparbud	
			Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kekayaan budaya daerah	0%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pilihan – Pariwisata	Disparbud	
			Pelestarian Budaya sebagai daya tarik wisata dengan melibatkan generasi muda serta tokoh masyarakat	0%	100%	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pilihan – Pariwisata	Disparbud	
			Jumlah seniman, dan potensi seni, serta jumlah kreasi yang dapat dipentaskan	0%	100%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pilihan – Pariwisata	Disparbud	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.3	Terciptanya kualitas pelayanan industri pariwisata	<p>Strategi: Peningkatan dan pelaksanaan kualitas pelayanan industri pariwisata melalui penambahan akses penerbangan Internasional, pembangunan terminal kapal pesiar Internasional, pusat seni, pusat kebudayaan, pusat souvenir khas Sulawesi Utara, museum-museum, pusat informasi pariwisata, dan meningkatkan kerjasama promosi pariwisata dengan propinsi-propinsi sekitar, serta melakukan promosi ke mancanegara maupun melaksanakan iven-iven lokal, nasional dan internasional secara berkala selanjutnya menciptakan <i>branding</i> tentang Sulawesi Utara</p> <p>Arah Kebijakan: Melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan industri pariwisata melalui penambahan akses penerbangan Internasional, pembangunan terminal kapal pesiar Internasional, pusat</p>	Cakupan informasi potensi kebudayaan dan pariwisata melalui pameran promosi di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kegiatan MICE	0%	100%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pilihan – Pariwisata	Disparbud	
			Proporsi objek wisata kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan serta keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan	0%	100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Disparbud	
			Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam menerapkan sadar wisata	0%	100%	Program Pengembangan Kemitraan		Disparbud	
			Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kekayaan budaya daerah	0%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Disparbud	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		seni, pusat kebudayaan, pusat souvenir khas Sulawesi Utara, museum-museum, pusat informasi pariwisata, dan meningkatkan kerjasama promosi pariwisata dengan propinsi-propinsi sekitar, serta melakukan promosi ke mancanegara maupun melaksanakan iven-iven lokal, nasional dan internasional secara berkala selanjutnya menciptakan <i>branding</i> tentang Sulawesi Utara	Pelestarian Budaya sebagai daya tarik wisata dengan melibatkan generasi muda serta tokoh masyarakat	0%	100%	Program Pengembangan Nilai Budaya		Disparbud	
			Jumlah seniman, dan potensi seni, serta jumlah kreasi yang dapat dipentaskan	0%	100%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Disparbud	
9.4	Tetap terjaganya tata nilai sosial budaya	Strategi: Peningkatan tata nilai sosial budaya  Arah Kebijakan: Meningkatkan tata nilai sosial budaya	Cakupan informasi potensi kebudayaan dan pariwisata melalui pameran promosi di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kegiatan MICE	0%	100%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Wajib - Kebudayaan	Dinas Sosial dan Kebudayaan	
			Proporsi objek wisata kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan serta keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan	0%	100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Disparbud	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam menerapkan sadar wisata	0%	100%	Program Pengembangan Kemitraan			
			Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kekayaan budaya daerah	0%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
			Pelestarian Budaya sebagai daya tarik wisata dengan melibatkan generasi muda serta tokoh masyarakat	0%	100%	Program Pengembangan Nilai Budaya			
			Jumlah seniman, dan potensi seni, serta jumlah kreasi yang dapat dipentaskan	0%	100%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			
MISI X: Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.									
10.1	Terciptanya Badan Kerjasama Internasional: <i>North Sulawesi Global Partners (NSGP)</i>	Strategi: Pembentukan badan kerjasama Internasional: <i>North Sulawesi Global Partners (NSGP)</i>  Arah Kebijakan: Mendorong pembentukan badan kerjasama international untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan				Program Kerjasama Pembangunan	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2	Terlaksananya kerjasama sub-regional <i>Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)</i>	Strategi: Pemantapan kerjasama sub-regional <i>Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)</i>  Arah Kebijakan: Mendorong pemantapan kerjasama sub-regional <i>Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)</i> agar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi Sulawesi Utara serta mitra kerjasama				Program Kerjasama Pembangunan	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
10.3	Terlaksananya kerjasama antar daerah: antar kabupaten/kota dan propinsi, Badan Kerjasama Propinsi-propinsi Kepulauan, Kawasan Timur Indonesia (KTI), Badan Kerjasama Pembangunan Regional	Strategi: Pemantapan kerjasama antar daerah: antar Kabupaten/Kota dan Propinsi, Badan Kerjasama Propinsi-propinsi Kepulauan, Kawasan Timur Indonesia (KTI), Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), dan kerjasama pengelolaan Teluk Tomini  Arah Kebijakan: Mendorong pemantapan kerjasama antara daerah untuk pengelolaan sumber daya secara optimal dan				Program Kerjasama Pembangunan	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
			Terlaksananya Promosi Investasi	-	100%	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Wajib – Penanaman Modal	Badan Koordinasi Penanaman Modal	
			Terciptanya realisasi Investasi	-	100%	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Wajib – Penanaman Modal	Badan Koordinasi Penanaman Modal	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sulawesi (BKPRS), dan kerjasama pengelolaan Teluk Tomini	menguntungkan semua pihak	Tersedianya kajian Potensi Unggulan daerah	-	100%	program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Wajib – Penanaman Modal	Badan Koordinasi Penanaman Modal	
10.4	Tersedianya Sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI)	Strategi: Pembangunan kualitas keberadaan Sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI)  Arah Kebijakan: Mendorong percepatan pembangunan Sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI) untuk meningkatkan partisipasi dan promosi Sulawesi Utara di kancan internasional	Jumlah pulau yang teridentifikasi potensinya	1	15	Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pilihan - Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah koordinasi perencanaan	3 kegiatan	3 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan			
MISI XI: Memantapkan revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah.									
11.1	Terwujudnya swasembada berkelanjutan produk pertanian dan peternakan	Strategi: Melakukan revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi SDM, revitalisasi pembiayaan petani dan peternak, kelembagaan petani serta revitalisasi teknologi dan industri hilir	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi 584.031 Ton, Jagung 446.144 Ton, Kedelai 7.627 Ton, Kacang Hijau 2.184 Ton, Kacang Tanah 8.671 Ton, Ubi Kayu 84.083 Ton, Ubi Jalar 51.838 Ton, Buah-Buahan 152.296	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Pilihan - Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Arah Kebijakan: Mendorong upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan		Ton, Sayuran 384.039 Ton, Bunga Potong 5.563.632 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 659.990 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 22.603 Kg, Tanaman Obat 3.239.722 Kg	Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg				
			Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi 584.031 Ton, Jagung 446.144 Ton, Kedelai 7.627 Ton, Kacang Hijau 2.184 Ton, Kacang Tanah 8.671 Ton, Ubi Kayu 84.083 Ton, Ubi Jalar 51.838 Ton, Buah-Buahan 152.296 Ton, Sayuran 384.039 Ton, Bunga Potong 5.563.632 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 659.990 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 22.603 Kg, Tanaman Obat 3.239.722 Kg	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Pilihan - Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi 584.031 Ton, Jagung 446.144 Ton, Kedelai 7.627 Ton, Kacang Hijau 2.184 Ton, Kacang Tanah 8.671 Ton, Ubi Kayu 84.083 Ton, Ubi Jalar 51.838 Ton, Buah-Buahan 152.296 Ton, Sayuran 384.039 Ton, Bunga Potong 5.563.632 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 659.990 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 22.603 Kg, Tanaman Obat 3.239.722 Kg	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Pilihan - Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			produksi peternakan (Kg)	Produksi Daging Sapi 4.639.361 Kg, Babi 16.061.280 Kg, Ayam 2.313.971 Kg, Itik 59.772 Kg	Produksi Daging Sapi 5.421.657 Kg, Babi 19.541.003 Kg, Ayam 2.456.086 Kg, Itik 71.714 Kg	Program peningkatan produksi peternakan	Pilihan - Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.2	Terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan ( <i>food security</i> ), dan cadangan pangan di masyarakat	Strategi: Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan segar  Arah Kebijakan: Menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan, pengembangan sistem distribusi pangan, melaksanakan diversifikasi penganeekaragaman konsumsi pangan menuju gizi seimbang, pembinaan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan, mencegah/menangani keadaan rawan pangan dan gizi, serta penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan	meningkatkan ketahanan pangan masyarakat (jumlah cadangan pangan pemerintah daerah)	-	31 Ton	Program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Wajib – Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	
11.3	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan dan pembudidaya serta daya saing produk perikanan	Strategi: Mendorong pengembangan kawasan Minapolitan, peningkatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan masyarakat pesisir serta pengembangan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap  Arah Kebijakan: Melakukan optimalisasi	NTP Nelayan	97	108	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Pilihan – Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah POKMASWAS	77 Klmk	200 Klmk	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pilihan – Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		potensi perikanan budidaya dan tangkap, pengembangan infrastruktur penunjang usaha perikanan, industri perikanan, pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah produksi budidaya	98.503	697.694	Program pengembangan budidaya perikanan			
			Jumlah produksi tangkap	222.221	244.542	Program pengembangan perikanan tangkap	Pilihan – Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah kegiatan pembinaan ke masyarakat	3 kegiatan	10 kegiatan	Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan	Pilihan – Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah ekspor perikanan (nilai ekspor)	96.094.118	155.000	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pilihan – Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah pulau yang teridentifikasi potensinya	1	15	Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pilihan – Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah koordinasi dengan kab/kota	2 kegiatan	10 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Pilihan – Kelautan dan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah koordinasi perencanaan	3 kegiatan	3 kegiatan	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Pilihan – Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
11.4	Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	<p>Strategi: Pengembangan budidaya perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan integrasi; pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); peningkatan kualitas SDM petani dan pelaku usaha perkebunan dan peningkatan kemitraan lembaga usaha/permodalan</p> <p>Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan potensi dan keunggulannya; mendorong dan memfasilitasi pengembangan SDM petani dan pelaku usaha perkebunan; mendorong pengembangan hasil olahan tanaman perkebunan dan turunannya dengan memanfaatkan teknologi tepat guna</p>	-	-	-	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pilihan - Perkebunan	Dinas Perkebunan	
			-	-	-	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pilihan - Perkebunan	Dinas Perkebunan	
			-	-	-	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pilihan - Perkebunan	Dinas Perkebunan	
			-	-	-	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pilihan - Perkebunan	Dinas Perkebunan	
			-	-	-	Program Pemberdayaan Petani Dan Nelayan	Pilihan - Perkebunan	Dinas Perkebunan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-	-	-	Program Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan	Pilihan - Perkebunan	Dinas Perkebunan	
11.5	Terciptanya pusat-pusat riset dan kerjasama Penelitian	Strategi: Pembangunan pusat-pusat riset dan pengembangan kerjasama penelitian  Arah Kebijakan: Mendorong pembangunan pusat-pusat riset dan pengembangan di bidang pertanian dan perikanan bekerjasama untuk memperoleh hasil yang dapat diterapkan serta lebih berkualitas				Program Pengembangan Data/ Informasi	Wajib – Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana			
						Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah			
11.6	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan penyuluh	Strategi: Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme penyuluh; Pembentukan kelembagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyuluhan; meningkatkan hubungan kerjasama dengan asosiasi, federasi dan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan penyuluhan pada publik	1250 penyuluh	1250 penyuluh	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Pilihan – Pertanian	BAKORLUH	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan
			Meningkatnya Nilai Tukar Petani	104,27	99,99	Program Pemberdayaan Petani dan Nelayan	Pilihan - Pertanian	BAKORLUH	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>organisasi serta pelaku usaha; serta meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga permodalan</p> <p>Arah Kebijakan: Mendorong perbaikan kesejahteraan penyuluh; penguatan kelembagaan penyuluh di kabupaten/kota; melaksanakan bintek/pelatihan bagi penyuluh; peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan serta peningkatan koordinasi dan fasilitasi antar sub sector</p>							
<b>MISI XII: Menyediakan infrastruktur publik yang memadai.</b>									
12.1	Tersusunnya Perda RTRW Provinsi	<p>Strategi : Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan pengembangan wilayah</p> <p>Arah Kebijakan : Koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi bersama kabupaten/kota</p>	<p>Tersedianya tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum</p> <p>Terlaksananya proses penyusunan kebijakan penataan ruang berupa penyusunan RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi, melalui penjangkaran aspirasi</p>		56 ha luas tanah	<p>Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p> <p>Program Perencanaan untuk Tata Ruang</p>	Wajib Penataan ruang	Dinas PU	
				15 kab/kota	-				

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			masyarakat dalam forum konsultasi publik, sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis yang memenuhi syarat inklusif, dan meningkatnya tingkat pengetahuan aparatur penataan ruang						
			Tersusunnya kebijakan pengendalian ruang		15 kab/kota	Program Pengendalian Ruang			
12.2	Terwujudnya jalan-jalan perkotaan dan pedesaan	Strategi: Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan  Arah Kebijakan: Mendorong dan berperan serta dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam meningkatkan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan ukuran perekonomian serta menurunkan ekonomi biaya tinggi	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan	8,86 km panjang jalan	-	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas PU	
			Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	68,23 km dari 940.330 km	95,36 km dari 940.330 km	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas PU	
			Terinspeksinya kondisi jalan dan jembatan	940,33 km	940,33 km	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas PU	
				26 jalan akses desa/ kelurahan		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas PU	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan		120 (m) jembatan	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas PU	
12.3	Terwujudnya akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Strategi: Pembangunan dan peningkatan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan  Arah Kebijakan: Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk memudahkan penjualan hasil-hasil produksi serta mengurangi disparitas harga hasil-hasil produksi tersebut antara kota dan desa	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan	8,86 km panjang jalan	-	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Wajib – Pekerjaan umum	Dinas PU	
			Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	68,23 km dari 940.330 km	95,36 km dari 940.330 km	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Wajib – Pekerjaan umum	Dinas PU	
				26 jalan akses desa/ kelurahan		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Wajib – Pekerjaan umum	Dinas PU	
12.4	Terwujudnya fasilitas pelayanan air bersih dan air baku	Strategi: Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 drainase desa/ kelurahan	67 titik drainase di jalan propinsi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas P U	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Arah Kebijakan: Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan pihak swasta untuk penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku		7 SPAM desa/ kelurahan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas P U	
12.5	Terlaksananya pembangunan <i>air-strip</i> dan bandara di kabupaten/kota oleh pihak swasta	Strategi: Pengembangan <i>air-strip</i> dan bandara di kabupaten/kota oleh pihak swasta  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan <i>air-strip</i> dan bandara di kabupaten/kota oleh pihak swasta untuk membentuk jaringan transportasi udara yang terintegrasi	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara	0 Meter	201.039 Meter	Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Wajib – Perhubungan	Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi	
12.6	Terbangunnya pembangkit tenaga listrik menggunakan energi baru dan terbarukan seperti: panas bumi, air, matahari, angin, arus laut, dan lainnya	Strategi: Pembangunan pembangkit tenaga listrik menggunakan energi baru dan terbarukan seperti: panas bumi, air, matahari, angin, arus laut, dan lainnya  Arah Kebijakan: Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan terutama yang tersedia secara lokal dalam pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun maupun yang akan ditingkatkan	Rasio Elektrifikasi	60%	85%	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	
			Rasio Elektrifikasi	60%	-	Program pembangunan pengembangan ketenagalistrikan	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.7	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan air bersih	Strategi: Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral, panas bumi, dan air tanah  Arah Kebijakan: Mendorong pemanfaatan air tanah sebagai sarana air bersih bagi masyarakat/daerah sulit air bersih	meningkatnya potensi pemanfaatan sumber daya energi, sumber daya mineral dan air tanah untuk pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat (cakupan kab/ kota yang dapat mengembangkan usaha bidang ESDM)	12 Kab/ kota	13 Kab/ kota	Program peningkatan kualitas dan arus informasi	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	
12.8	Terlaksananya fasilitas kebersihan dan sanitasi	Strategi: Penambahan dan pemeliharaan fasilitas kebersihan dan sanitasi  Arah Kebijakan: Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menambah dan memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi serta mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi	Tersedianya tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum		56 ha luas tanah	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Wajib-PU	Dinas PU	
12.9	Tersedianya perumahan yang layak huni dan terjangkau harganya	Strategi: Pengembangan perumahan yang layak huni dan terjangkau harganya dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 drainase desa/ kelurahan	67 titik drainase di jalan propinsi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Wajib-PU	Dinas PU	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih	Arah Kebijakan: Mengembangkan perumahan yang layak huni dan terjangkau harganya dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih	Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman	22 revitalisasi permukiman desa/ kelurahan	67 titik drainase di jalan propinsi	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Wajib-PU	Dinas PU	
				26 jalan akses desa/ kelurahan		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Wajib-PU	Dinas PU	
12.10	Terlaksananya peningkatan fasilitas hiburan dan rekreasi umum	Strategi: Peningkatan fasilitas hiburan dan rekreasi umum yang sudah ada  Arah Kebijakan: Meningkatkan fasilitas hiburan dan rekreasi umum yang sudah ada	Tersedianya tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum		56 ha luas tanah	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas P U	
12.11	Terlaksananya peningkatan sarana rekreasi petualangan alami ( <i>outdoor adventure recreation</i> )	Strategi: Pengembangan sarana rekreasi petualangan alami ( <i>outdoor adventure recreation</i> )  Arah Kebijakan: Mendorong pengembangan sarana rekreasi petualangan alami ( <i>outdoor adventure recreation</i> )	Tersedianya tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum		56 ha luas tanah	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas P U	
12.12	Terlaksananya peningkatan sarana rekreasi mass tourism	Strategi: Pengembangan sarana rekreasi <i>mass tourism</i>  Arah Kebijakan: Mengembangkan sarana	Proporsi objek wisata kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan serta keterlibatan	0%	100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pilihan – Pariwisata	Disparbud	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		rekreasi <i>mass tourism</i>	masyarakat dan stakeholder terkait dalam meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan						
<b>MISI XIII:</b> <b>Mengelola sumber daya alam secara efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim.</b>									
13.1	Terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam	Strategi: Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam  Arah Kebijakan: Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam agar memberikan memberi nilai tambah yang lebih besar bagi daerah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan meminimalisasi kerusakan lingkungan	Terminimalisasi Pencemaran Lingkungan yang merusak kualitas air dan udara	-	- 6 Kab/kota mendapata penghargaan adipura  - 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya  - 6 kota terpantau kualitas udara Ambient  - Penanganan kasus link 6 kasus	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Wajib – Lingkungan Hidup	BLH	
			Memastikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan link sudah terintegrasi kedalam kebijakan, rencana, dan/atau program daerah	-	- 1 dok RPPLH - 1 dok KLHS - Draft Ekoregion 1 dok - Bimtek pelaporan UKL/UPL 3 keg - Evaluasi implementasi KLHS 15 kab/kota - Binwas UKL/UPL 15 kab/kota	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Wajib – Lingkungan Hidup	BLH	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- Sosialisasi naskah akademik RPPLH 2 keg - Diseminasi amdal 2 keg				
			Menurunnya laju kerusakan lingkungan	-	- Penanaman pohon pada sumber mata air 100 titik - Penanaman Mangrove 10.000 pohon - Taman KEHATI 1 lokasi - Forum DAS Tondano 3 keg - Pengguna BPO sektor MAC 200 mobil - Penerima penghargaan kalpataru 15 Orang - 34 Sekolah Adiwiyata - Profil Kehati SULUT 1 dok	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam			
			Meningkatnya luasan tutupan karang hidup	-	Restorasi Terumbu Karang 2 Lokasi	Program rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya Penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	-	- SLHD 5 dok - Rakor PLH 5 keg - Pekan link 5 keg - pameran dan promosi 5 keg	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup			
13.2	Terwujudnya sumber-sumber air bersih yang baru, serta pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang telah ada	Strategi: Identifikasi dan pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang baru, serta pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang telah ada Arah Kebijakan: Mengembangkan upaya identifikasi sumber-sumber air bersih yang baru serta pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber air yang telah ada untuk menjaga ketersediaan air bersih untuk rumah tangga dan dunia usaha	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 drainase desa/ kelurahan	67 titik drainase di jalan propinsi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas PU	
				7 SPAM desa/ kelurahan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Wajib – Pekerjaan Umum	Dinas PU	
13.3	Terlaksananya pemanfaatan sumber daya mineral dan energi panas bumi	Strategi: Peningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan serta optimalisasi pengendalian dan pemanfaatan energi panas bumi Arah Kebijakan: Pengelolaan pemanfaatan	meningkatkan potensi pemanfaatan sumber daya mineral/ geologi untuk pengembangan usaha pertambangan (cakupan kab/ kota yang dapat mengembangkan wilayah usaha pertambangan)	12 Kab/ kota	13 Kab/ kota	Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumber daya mineral	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sumber daya mineral dan energi panas bumi yang berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan	meningkatnya potensi pemanfaatan sumber daya energi, sumber daya mineral dan air tanah untuk pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat (cakupan kab/ kota yang dapat mengembangkan usaha bidang ESDM)	12 Kab/ kota	13 Kab/ kota	Program peningkatan kualitas dan arus informasi	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	
13.4	Terwujudnya peningkatan eksplorasi pendahuluan sumberdaya mineral, air tanah dan monitoring kegunung apian	Strategi: Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral, panas bumi, dan air tanah  Arah Kebijakan: Mendorong pemanfaatan sumber daya mineral secara bijaksana untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	meningkatnya potensi pemanfaatan sumber daya mineral/ geologi untuk pengembangan usaha pertambangan (cakupan kab/ kota yang dapat mengembangkan wilayah usaha pertambangan)	12 Kab/ kota	13 Kab/ kota	Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumber daya mineral	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	
			meningkatnya potensi pemanfaatan sumber daya energi, sumber daya mineral dan air tanah untuk pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat (cakupan kab/ kota yang dapat mengembangkan usaha bidang ESDM)	12 Kab/ kota	13 Kab/ kota	Program peningkatan kualitas dan arus informasi	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.5	Tersedianya informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> tentang kawasan lingkungan geokologi sebagai dasar pemanfaatan sumber daya energi dan mineral	Strategi: Inventarisasi kawasan lingkungan geokologi sebagai sumber dari sumber daya energi dan pembuatan petanya sebagai dasar untuk melakukan pengawasan dan penertiban  Arah Kebijakan: Membuat peta geologi tehnik dan kawasan lingkungan geologi sebagai data dasar penunjang perencanaan fisik dan tata ruang untuk pengawasan serta penertiban	Cakupan informasi kawasan yang berpotensi merusak lingkungan	-	2 peta	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	
13.6	Terjaminnya ketersediaan energi minyak dan gas bumi bagi masyarakat	Strategi: Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan konservasi dan diversifikasi energi.  Arah Kebijakan: Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak dan gas bumi	Cakupan informasi kawasan yang berpotensi merusak lingkungan	-	2 peta	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	
13.7	Terwujudnya SDM bidang ESDM yang berkualitas dan profesional	Strategi: Peningkatan Kapasitas SDM Bidang ESDM yang berkualitas dan profesional  Arah Kebijakan: Meningkatkan kesadaran SDM bidang ESDM untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerjanya	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur di sektor energi dan sumberdaya mineral (cakupan aparatur yang memiliki pengetahuan yang komprehensif di sektor energi dan sumber daya mineral	15	20	Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur di sektor energi dan sumberdaya mineral	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.8	Terciptanya perlindungan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan	Strategi: Perlindungan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan  Arah Kebijakan: Menciptakan perlindungan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan	Terehabilitasinya hutan dan lahan kritis	-	-	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			Terkendalinya gangguan keamanan hutan dan pelaku tindak pidana kehutanan	-	75%	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			Terpeliharanya batas kawasan hutan	-	210 Km	Program Pemantapan Kawasan Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			Terminimalisasi Pencemaran Lingkungan yang merusak kualitas air dan udara	-	- 6 Kab/kota mendapata penghargaan adipura  - 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya  - 6 kota terpantau kualitas udara Ambient  - Penanganan kasus link 6 kasus	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pilihan Lingkungan Hidup	BLH	
			Memastikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan link sudah terintegrasi kedalam kebijakan, rencana,	-	- 1 dok RPPLH - 1 dok KLHS - Draft Ekoregion 1 dok - Bimtek pelaporan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pilihan Lingkungan Hidup	BLH	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan/atau program daerah		UKL/UPL 3 keg - Evaluasi implementasi KLHS 15 kab/kota - Binwas UKL/UPL 15 kab/kota - Sosialisasi naskah akademik RPPLH 2 keg - Diseminasi amdal 2 keg				
			Menurunnya laju kerusakan lingkungan	-	- Penanaman pohon pada sumber mata air 100 titik - Penanaman Mangrove 10.000 pohon - Taman KEHATI 1 lokasi - Forum DAS Tondano 3 keg - Pengguna BPO sektor MAC 200 mobil - Penerima penghargaan kalpataru 15 Orang - 34 Sekolah Adiwiyata - Profil Kehati SULUT 1 dok	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Pilihan Lingkungan Hidup	BLH	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya luasan tutupan karang hidup	-	Restorasi Terumbu Karang 2 Lokasi	Program rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Pilihan Lingkungan Hidup	BLH	
13.9	Terlaksananya pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Strategi: Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Energi dan Air Tanah Untuk Masyarakat.  Arah Kebijakan: Mendorong pemanfaatan hasil penyelidikan dan pemetaan sumber daya geologi dan geologi lingkungan untuk perencanaan tata ruang	Cakupan informasi kawasan yang berpotensi merusak lingkungan	-	2 peta	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Pilihan - ESDM	Dinas ESDM	
			Terehabilitasinya hutan dan lahan kritis	-	-	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
			Terkendalinya gangguan keamanan hutan dan pelaku tindak pidana kehutanan	-	75%	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	
13.10	Terlaksananya program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana	Strategi: Kampanye program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana secara intensif  Arah Kebijakan: Mengembangkan kampanye program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana secara intensif untuk membentuk kesiapan masyarakat untuk menyesuaikan kegiatan dengan perubahan iklim dan	Terkendalinya gangguan keamanan hutan dan pelaku tindak pidana kehutanan	-	75%	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bencana yang ada serta memperkecil dampak negatif yang ditimbulkannya							
13.11	Terciptanya regulasi (PERDA) yang berhubungan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana	Strategi: Pembuatan regulasi (PERDA) yang berhubungan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana  Arah Kebijakan: Mengembangkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim dan bencana untuk memberikan kekuatan hukum dalam upaya membangun suatu kemampuan melakukan adaptasi perubahan iklim dan bencana				Program Penataan peraturan perundang-undangan		Setda (Biro Hukum dan HAM)	
13.12	Terlaksananya sosialisasi dan kampanye penanganan dampak perubahan iklim dan bencana kepada masyarakat	Strategi: Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penanganan dampak perubahan iklim dan bencana kepada masyarakat  Arah Kebijakan: Mendorong dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pemantapan kerjasama internasional terkait perubahan iklim dan bencana	Terbentuknya kelembagaan KPHP/L	-	-	Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan	Pilihan - Kehutanan	Dinas Kehutanan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.13	Terlaksananya peningkatan peran aktif secara global dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim dan bencana	<p>Strategi: Peningkatan peran aktif secara global dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim dan bencana</p> <p>Arah Kebijakan: Meningkatkan peran aktif secara global dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim dan bencana</p>	Terminimalisasi Pencemaran Lingkungan yang merusak kualitas air dan udara	-	<p>- 6 Kab/kota mendapata penghargaan adipura</p> <p>- 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya</p> <p>- 6 kota terpantau kualitas udara Ambient</p> <p>- Penanganan kasus link 6 kasus</p>	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Wajib – Lingkungan Hidup	BLH	
			Memastikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan link sudah terintegrasi kedalam kebijakan, rencana, dan/atau program daerah	-	<p>- 1 dok RPPLH</p> <p>- 1 dok KLHS</p> <p>- Draft Ekoregion 1 dok</p> <p>- Bimtek pelaporan UKL/UPL 3 keg</p> <p>- Evaluasi implementasi KLHS 15 kab/kota</p> <p>- Binwas UKL/UPL 15 kab/kota</p> <p>- Sosialisasi naskah akademik RPPLH 2 keg</p> <p>- Diseminasi amdal 2 keg</p>	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Wajib – Lingkungan Hidup	BLH	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Cakupan sistem informasi kebencanaan	-	-	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		BPBD	
			Cakupan pemulihan daerah bencana	-	3 daerah rawan bencana	Program Pemulihan Daerah Bencana		BPBD	
			Cakupan penyebaran informasi di daerah rawan bencana	-	-	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana		BPBD	
			Cakupan Daerah Resiko Bencana Tinggi	-	3 daerah	Program Pengurangan Resiko Bencana		BPBD	
			Cakupan Kelompok Masyarakat Siaga Bencana	-	3 pokmas	Program Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat		BPBD	
			Cakupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Tersedia	-	7 sarpras	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana		BPBD	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MISI XIV:</b> <b>Melaksanakan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial dengan memperhatikan kepentingan kaum perempuan, anak, dan lanjut usia.</b>									
14.1	Terciptanya kompetensi dan peran perempuan di segala aras	Strategi: Peningkatan kompetensi dan peran perempuan di segala aras  Arah Kebijakan: Mendorong dan mengembangkan upaya meningkatkan kompetensi dan peran perempuan di segala aras untuk meningkatkan kesetaraan gender di Sulawesi Utara	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,05%	68,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	31,84%	39,00%	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	5	1400,00%	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Porprosi Kursi parlemen yang diduduki perempuan	25,00%	25,00%	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah kader parpol perempuan yg mendapatkan pendidikan politik	50	200	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Proporsi desa/kelurahan yang mempunyai kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif	57% dari 92/159 (klompok desa/kel dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif dibagi total 92/159)	57% 92/159 (klompok desa/kel dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif dibagi total 92/159)	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Wajib	BPM-PD	
14.2	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak	Strategi: Perlindungan terhadap hak-hak anak  Arah Kebijakan: Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak	Jumlah peraturan/ sosialisasi kebijakan kualitas hidup anak dan perempuan	1 Dokumen Perda	Rancangan Peraturan Daerah Keadilan Gender	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Meningkatnya Jumlah Lembaga Peduli Perempuan dan Anak	2 Organisasi	2 Organisasi	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	30%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		75,00%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.3	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan	Strategi: Perlindungan terhadap hak-hak perempuan  Arah Kebijakan: Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terlibat aktif dalam perlindungan hak-hak perempuan	Jumlah peraturan/ sosialisasi kebijakan kualitas hidup anak dan perempuan	1 Dokumen Perda	Rancangan Peraturan Daerah Kesetaraan dan Keadilan Gender	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Meningkatnya Jumlah Lembaga Peduli Perempuan dan Anak	2 Organisasi	2 Organisasi	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	30%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	30%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,05%	68,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,00%	68,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Ratio Kekerasan dalam rumah tangga	0,40%	0,20%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		75,00%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan, perlindungan dan jaminan sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	11%	22 %	Program Jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	
			Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan	4%	22%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Wajib – Dinas Sosial	Dinas Sosial	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial						
14.4	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak Lansia	Strategi: Perlindungan terhadap hak-hak Lansia.  Arah Kebijakan: Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak lansia	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	100%	100%	Program pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Wajib - Sosial	Dinas Sosial	
14.5	Terlaksananya peningkatan kualitas perempuan dan anak	Strategi: Peningkatan kualitas perempuan dan anak  Arah Kebijakan: Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak				Program Keluarga Berencana		SETDA (Biro Kesra)	
			Meningkatnya Jumlah Lembaga Peduli Perempuan dan Anak	2 Organisasi	2 Organisasi	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	30%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	30%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,05%	68,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan			
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,00%	68,00%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Ratio Kekerasan dalam rumah tangga	0,40%	0,20%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		75,00%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.6	Terlaksananya program pengawasan masyarakat terhadap perlindungan anak	Strategi: Pengembangan serta pemantapan program pengawasan masyarakat terhadap perlindungan anak  Arah Kebijakan: Berperan aktif melakukan perlindungan anak	Jumlah peraturan/ sosialisasi kebijakan kualitas hidup anak dan perempuan	1 Dokumen Perda	Rancangan Peraturan Daerah Keadilan Gender	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Meningkatnya Jumlah Lembaga Peduli Perempuan dan Anak	2 Organisasi	2 Organisasi	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	30%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	30%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		75,00%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Wajib - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MISI XV:</b> <b>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh, dan pegawai).</b>									
15.1	Terwujudnya target-target <i>Millenium Development Goals (MDGs)</i>	Strategi: Pencapaian target-target <i>Millenium Development Goals (MDGs)</i>  Arah Kebijakan: Mendorong dan mengembangkan upaya pencapaian target-target <i>Millenium Development Goals (MDGs)</i>				Program Kerjasama Pembangunan		Bappeda	
						Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Bappeda	
						Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar		Bappeda	
						Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah		Bappeda	
						Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu		Bappeda	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.2	Terwujudnya hak-hak pegawai dan buruh	Strategi: Penjaminan hak-hak pegawai dan buruh  Arah Kebijakan: Mendorong dunia usaha untuk menjamin hak-hak pegawai dan buruh lewat suatu sistem pengawasan kerjasama industrial yang lebih baik	Terselenggaranya Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/Kota di Sulut			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Wajib - Tenaga Kerja	Dinas kesehatan/ Biro Kesra	
			Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) serta Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	40% ( Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan 30% (Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif)	80% ( Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan 50% (Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif)	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Wajib - Tenaga Kerja	Dinas kesehatan/ Biro Kesra	
15.3	Terwujudnya penguasaan teknologi bagi tenaga para pekerja	Strategi: Peningkatan dan penguasaan teknologi bagi tenaga para pekerja  Arah Kebijakan: Mendorong pelatihan untuk peningkatan dan penguasaan teknologi bagi tenaga para pekerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan kewirausahaan	20% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi); 15% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat); 10% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat);	80% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi); 65% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat); 60% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat);	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Wajib - Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi-grasi	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				mengikuti pelatihan kewirausahaan)	mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan)				
15.4	Terlaksananya UMR provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian	Strategi: Penetapan UMR Provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian  Arah Kebijakan: Mendorong penetapan UMR Provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian	Terselenggaranya Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/Kota di Sulut			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Wajib – Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi-grasi	
15.5	Terwujudnya Teknologi Inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai	Strategi: Dorongan penguasaan teknologi inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai  Arah Kebijakan: Mendorong dan berperan dalam meningkatkan penguasaan teknologi inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan mereka serta mendorong peningkatan ekonomi daerah	Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	14,44% ( Dari jumlah 1733 Desa/ kel/ 12 Desa/Kel terbaik x 100%)	15,22 % ( Dari Jumlah 1827 Desa/Kel terdiri dari 1495 desa 332 kel / 12 Desa/Kel x 100%)	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Wajib- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPM-PD	
			Proporsi desa yang mempunyai kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif	47 % dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	47% dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan	Wajib – Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi-grasi	
			Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	0.71 % dari 10/1401X100% ( Dari 159 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1401 desa tahun	0,69 % 10/1495X100% ( Dari 162 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1495 desa	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	Wajib – Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi-grasi	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2010 x 100%)	tahun 2015 x 100%)				
			Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	2,42% ( Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec / 70 PJO yg dilatih x 100%) <b>apa jlh kec,desa sasaran atau total kec,desa se prov sulut</b>	1,7 % (Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec /100 PJO yg dilatih x 100%)	Program Nasional pemberdayaan masyarakat	Wajib – Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi-grasi	
			Jumlah desa/kelurahan yang melakukan diseminasi desa percontohan	-	2 desa	Program Peningkatan pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Wajib – Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi-grasi	